

**KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING
DI DESA WUASA KECAMATAN LORE UTARA
KABUPATEN POSO**

Oleh
Devi Noflisa Nggasi
B401 21 259

SKRIPSI

**Dalam rangka penulisan Skripsi
Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU 2025**

***POLICY FOR HANDLING STUNTING
IN WUASA VILLAGE, LORE UTARA DISTRICT POSO
REGENCY***

By

Devi Noflisa Nggasi

B401 21 259

THESIS

***In the context of writing a thesis to obtain a Bachelor of
Government Science at Faculty of Social and Political Sciences
Tadulako University***



***GOVERNMENT SCIENCE STUDY PROGRAM DEPARTMENT
OF ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY OF SOCIAL AND
POLITICAL SCIENCES TADULAKO UNIVERSITY
PALU 2025***

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI DESA WUASA
KECAMATAN LORE UTARA
KABUPATEN POSO**

Oleh

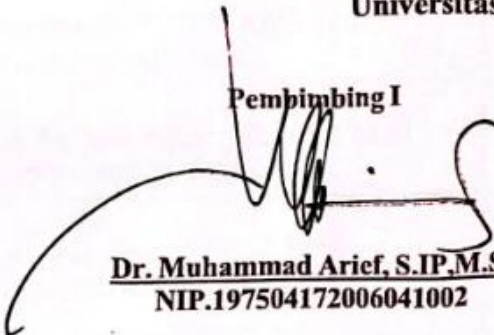
Devi Noflisa Nggasi

B401 21 259


SKRIPSI

**Dalam rangka penulisan Skripsi
Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako Palu, 2025**

Pembimbing I


Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si
NIP.197504172006041002

Pembimbing 2


Sulfitri Husain, S.I.P., M.A
NIP. 198008262024212001

Mengetahui:

**Koordinator Program studi
Ilmu Pemerintahan**


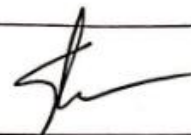






Dr. Yudas, S.Sos., M.Si
NIP.197504172006041002

HALAMAN PERSETUJUAN

Di terima oleh Panitia Ujian Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, untuk memenuhi sebagai syarat syarat guna memperoleh gelar sarjana:

Nama : DEVI NOFLISA NGGASI
Stambuk : B40121259
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Desember 2025
Judul Skripsi : Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Nurhannis, M.Si NIP.1964121119890031002	Ketua	
2.	Sisrilnardi, S.IP. MA NIDN. 0020019007	Sekretaris	
3.	Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP, M.Si NIP.197503202006041002	Penguji Utama	
4.	Dr. Muhammad Arief, M.Si NIP.19750472006041002	Pembimbing Utama	
5.	Sulfitri Husain, S.I.P., M.A NIP.198008262024212001	Pembimbing Pendamping	

Panitia Ujian

Palu, Desember 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi



Dr. Muhammad Arief, M.Si
NIP.19750472006041002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini asli dan belum pernah di teliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, atau doktor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dan di sebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palu, 23 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Devi Noflisa Nggasi

B40121259

ABSTRAK

Devi Noflisa Nggasi, Nomor stambuk B 401 21 259, Judul : “Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso” Dibawah bimbingan Bapak **Muhammad Arief** sebagai pembimbing I dan Ibu **Sulfitri Husain** sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori dari George C Edward III dengan empat indikator yaitu *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi*, Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Teknik menentukan informan menggunakan purposive dengan informan 5 orang. Selain itu, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan metode analisis data melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di Desa Wuasa dari empat indikator yang di gunakan dalam penelitian bahwa Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso cukup baik tetapi memiliki kendala contohnya, Kurangnya pemahaman terkait stunting, kurangnya anggaran dari pemerintah, dan kehamilan usia dini.

Kata Kunci : Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Birokrasi, Stunting

ABSTRACT

Devi Noflisa Nggasi, Student ID Number B 401 21 259, Title: "Stunting Management Policy in Wuasa Village, North Lore District, Poso Regency." Under the guidance of Mr. Muhammad Arief as Supervisor I and Mrs. Sulfitri Husain as Supervisor II, this study aims to determine the Stunting Management Policy in Wuasa Village, North Lore District, Poso Regency. In this study, the author uses the theory of George C. Edward III with four indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The technique for determining informants is purposive with 5 informants. In addition, the data collection technique for this study is through observation, interviews, and documentation. The data analysis method includes the stages of data collection, data presentation, data condensation, and conclusion drawing. The research results show that the four indicators used in the study in Wuasa Village indicate that the Stunting Management Policy in Wuasa Village, North Lore District, Poso Regency, is quite good, but there are challenges, such as a lack of understanding regarding stunting, insufficient government funding, and early pregnancy.

Keywords: Policy, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy, Stunting

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kebaikan Dan Penyertaan Tuhan Yesus, oleh karena Anugerah-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan saya dan kasih setia yang besar sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini Judul **“KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI DESA WUASA KECAMATAN LORE UTARA KABUPATEN POSO”** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Tadulako. Penulis mengakui bahwa dalam proses pendidikan serta penulisan Skripsi ini ada banyak tantangan dan hambatan. Namun karena kebaikan Tuhan Yesus serta kerja keras, usaha dan Doa serta bantuan dari berbagai pihak , penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah berjuang selama hidupnya dan telah membesarkan dengan segala upaya, sabar dan ikhlas mengiringi setiap langka penulis. Ucapan terima kasih yang setulusnya mengalir kepada Mama Mapsus tercinta, terkasih yang senantiasa selalu berjuang untuk memberikan dukungan, kasih sayang, materi dan selalu memberikan Doa demi keberhasilan penulis. Ucapan terima kasih kepada Almarhum. Papa Yanbertus yang sudah memberikan banyak nasehat semasa hidup beliau sehingga menjadi motivasi saya sampai hari ini. Ucapan terima kasih kepada kakak saya tercinta Elma yang telah menggantikan peran papa selama ini, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, materi dan selalu memberikan doa demi keberhasilan penulis. Kedua orang tua penulis telah berjuang mencari nafkah tidak peduli hujan, panas teriknya matahari tetap bekerja dan selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya dan

sekali lagi terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak penulis yang telah memenuhi segala kebutuhan penulis. Semoga kedua orang tua dan kakak saya bangga dengan perjuangan yang mampu menyekolahkan anak keduanya hingga sarjana. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik . Puji Tuhan berkat doa Mama, Papa Dan Kakak, penulis dapat menyelesaikan studi (S1) sesuai dengan janji dan harapan mereka, dengan penuh rasa syukur penulis dapat mencapainya saat ini. Ucapan terima kasih juga kepada Adik tercinta Juin Dan Virgin, Kakak Ipar Avil, Ponakan Kirey Dan Kendrik dan kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua Dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Arief, S.I.P, M.Si selaku pembimbing I serta Terima kasih kepada Ibu Sulfitri Husain, S.I.P, M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing selama penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kesibukan dan pekerjaan tetap bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan ide, kritik dan saran serta solusi pada setiap permasalahan dan kesulitan, selalu memberikan dukungan sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada tim penguji, Bapak Dr. Nurhannis, M.Si selaku ketua, Bapak Dr. M.Nur Alamsyah, S.I.P, M.Si selaku penguji utama dan Bapak Sisrilnardi, S.I.P, M.A selaku sekertaris. Terima kasih untuk tim penguji yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di ujian penulis, dan memberikan saran yang baik selama proses pendidikan penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak berbagai pihak yang selama ini telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Sebagai bentuk penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka izinkanlah penulis mengungkapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Amar S.T.,MT.,IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tadulako.
2. Bapak Dr. Muh. Nawawi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
3. Bapak Dr. Mohammad Irfan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan dan Ibu Dr. Rismawati, S.Sos., MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arief, S.IP,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi. Terima kasih kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan baik teori maupun praktek dan segenap Staf Tata Usaha dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Yunus, Sos,M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
7. Terima kasih kepada Bapak Budi Utomo Mondolu, S.Pd., M.Si Selaku Kepala Desa Wuasa yang memeberikan izin meneliti dan sedikit menginformasikan tentang

Kebijakan penanganan stunting.

8. Terima kasih kepada Ibu Lita Sore selaku ketua Kader Posyandu Stunting dan Para Anggotanya.
9. Terima kasih kepada Sahabat Yusran, Diki wahyudi, Aldi, Andika, Dahlia, Rosnawati, yang sudah membantu dalam segala urusan di Kampus.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelas E angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam proses menempuh pendidikan S1 dan terima kasih atas kerja samanya dalam hal mengejar pendidikan.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN 109 khususnya Posko Toraranga
12. Terima kasih kepada Mama Thea yang selalu siap dalam menemani segala urusan di kampus, Terima kasih kepada Macengs, Cesi, Juwita, Alda, Nono, Pumpu, Mama Pindri, Gio, Agresya, Eto Dan teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
13. Terima kasih kepada seluruh Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses perkuliahan dan terima kasih atas semua pelajaran serta pengalaman yang telah kalian berikan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada seluruh teman, sahabat Dan Kelurga Besar yang dalam hal ini belum bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dilimpahi berkat atas kebaikan kalian semua. Semoga Tuhan Yesus senantiasa Memberkati kita.
15. Terima kasih untuk sahabatku Wilma Sari S.IP yang sudah kebersamaai

perjalanan di perkuliahan ini yang awalnya kita tidak saling kenal kini menjadi saudariku. Semoga kamu selalu di limpahkan berkat dan kesehatan dari Tuhan agar kelak di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali seperti yang sudah kita bayangkan kala itu.

16. Terakhir saya mau mengucapkan Terima kasih pada Diri sendiri yang sudah kuat bertahan walaupun di iringi dengan banyak air mata dalam penyusunan skripsi ini terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan Puji Tuhan semua bisa di lewati sehingga bisa sampai di tahap ini.

Semoga semua dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik bagi semua pihak dan mendapat berkat yang melimpa dari Tuhan Yesus . Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Palu, 17 Juli 2025
Penulis



Devi Noflisa Nggasi

B40121259

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	9
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis	9
1.3.2.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Penelitian Terdahulu	9
2.1.2 Landasan Teoritis Dan Kepustakaan Yang Relevan	12
2.1.2.1 Definisi Pemerintah	12
2.1.2.2 Definisi Pemerintah Desa	14
2.1.2.3 Fungsi dan Peran Pemerintah Desa	16
2.1.2.4 Kebijakan	19
2.1.2.5 Konsep Stunting	24
2.1.2.6 Program Penanganan Stunting	26

2.1.2.7 Penanganan Stunting	30
2.2 Alur Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Dasar Dan Tipe Penelitian	33
3.1.1 Dasar Penelitian	33
3.2. Definisi Konsep	34
3.3 Jenis Data	35
3.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Sumber Data	36
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis Data	38
3.7 Penentuan Lokasi Peneliti	40
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Gambaran lokasi penelitian	41
4.2 Demografi	42
4.3 Peran Pemerintah Desa	42
4.4 Jumlah Stunting Di Desa Wuasa	44
4.6 Posyandu	46
4.7 Kader Stunting	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Penanganan Stunting	48
5.1.1 Komunikasi	48
5.1.2 Sumber Daya	56
5.1.3 Disposisi	66
5.1.4 Struktur Birokrasi	78
BAB IV PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kependudukan	43
Tabel 2.1 Jumlah Stunting Tahun 2025	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir	32
Gambar 1.2 Model Interaksi Analisi Data	40
Gambar 1.3 Struktur Pemerintah Desa Wuasa	45

DAFTAR IAMPIRAN

1. Tabel jadwal penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Daftar Identitas Informan
7. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Desa Wuasa, perhatian terhadap stunting menjadi fokus utama karena efek jangka panjangnya pada kualitas sumber daya manusia. Stunting tidak hanya menghalangi pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan mental anak, meningkatkan kemungkinan penyakit tidak menular di kemudian hari, serta menurunkan produktivitas ekonomi. Upaya Penanganan Stunting melalui Program Makanan Tambahan di Desa Wuasa salah satu langkah yang didasarkan pada bukti untuk mengatasi masalah stunting di Desa Wuasa adalah pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak balita. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berada dalam fase pertumbuhan yang penting, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dengan menyalurkan nutrisi yang kaya akan protein dan mikronutrien. Selain penyaluran PMT, program ini juga melibatkan pendampingan dari kader kesehatan untuk memastikan pola makan yang baik dan mengawasi perkembangan anak.

Metode ini tidak hanya memperbaiki status gizi balita tetapi juga memberdayakan ekonomi setempat dengan melibatkan petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan makanan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa langkah-langkah ini berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting sebesar 10% dalam waktu satu tahun, sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya gizi yang seimbang. Keberhasilan ini

didukung oleh kerjasama antara pemerintah desa, puskesmas, Koramil, Polsek, dan masyarakat dalam menangani masalah stunting di tingkat desa.

Ada beberapa pelaksana dalam peraturan bupati Poso termasuk Desa Wuasa yang Terletak di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso juga di temukannya masalah stunting pada anak balita. Jumlah stunting pada tahun 2019 sebanyak 5 anak, 2020 sebanyak 8 anak, 2021 sebanyak 6 anak 2022 sebanyak 9 anak dan 2023 sebanyak 12 anak, 2024 sebanyak 8 anak 2025 sebanyak 8 anak .Bahwa jumlah angka stunting mengalami naik turun yang di sebabkan oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh kehamilan di usia dini atau hamil di luar nikah, hal ini akan berdampak pada kurangnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya, sementara kondisi kesehatan ibu sangat mempengaruhi kesehatan janin, sehingga penting bagi ibu untuk memastikan asupan gizi yang cukup, termasuk mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi, serta mengatur waktu istirahat yang memadai. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dari ke empat aspek tersebut terdapat masalah dari Komunikasi dan Sumber daya.

Kebijakan adalah sebuah pernyataan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum mengenai penetapan ruang lingkup, sehingga memberikan batasan dan arah bagi individu dalam menjalankan tindakan. Secara etimologis, istilah "kebijakan" diterjemahkan dari kata "policy. " Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, serta cara bertindak. Kebijakan dapat berupa keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan

tingkat tinggi, bukan sekadar kegiatan rutin yang terprogram atau yang terkait.

Kebijakan pemerintah, pada dasarnya, merupakan sebuah kebijakan yang ditujukan kepada publik. Hal ini mencakup "sektor ekonomi yang dikelola oleh suatu negara atau pemerintahan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi-organisasi pemerintah, serta masyarakat yang saling berinteraksi dan mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas," dalam arti yang luas. Dengan demikian, kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan publik (James E. Anderson 2015).

Pengembangan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting seiring dengan kemajuan di sektor-sektor lainnya. Setiap tahap pembangunan perlu dilaksanakan berdasarkan rencana yang matang. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan, terutama jika diimbangi dengan pelaksanaan yang efektif. Upaya pengembangan kesehatan ini juga diakui sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Hal tersebut merupakan suatu proses yang ditujukan untuk mencapai tujuan jangka panjang, memperhatikan kepentingan antar generasi, serta berusaha menyediakan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Tujuannya adalah mempersiapkan masa depan dan memastikan kelangsungan hidup yang baik di waktu yang akan datang.

Pada tahun 2024, pemerintah meluncurkan strategi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Strategi ini mencakup lima pilar utama dalam Strategi Nasional (Stranas) untuk percepatan penurunan stunting, yang telah ditetapkan

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang diperkenalkan pada tahun 2017. Melalui strategi ini, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting menjadi di bawah 20% pada tahun 2024 (Kemenkes RI 2021). Isi Pilar tersebut antara lain.

1. Mencerminkan komitmen dan visi kepemimpinan tertinggi negara, yang bertujuan untuk menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas utama pemerintah.
2. Dari inisiatif ini adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat, sekaligus mendorong perubahan perilaku yang mendukung pencegahan stunting. Hal ini akan dilakukan melalui berbagai media dan saluran komunikasi.
3. Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi program yang melibatkan Pusat, Daerah, dan Desa. Tujuan dari pilar ini adalah untuk memastikan sinkronisasi antara program-program nasional, lokal, dan masyarakat dengan mengadopsi pendekatan multisektor. Hal ini dilakukan melalui konvergensi program di semua tingkatan.
4. Gizi dan Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi serta mendorong ketahanan pangan.

Pemantauan dan Evaluasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjamin pelayanan yang berkualitas, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat proses pembelajaran. Berdasarkan lima pilar tersebut, Kabupaten Poso telah mengambil langkah- langkah konkret untuk menangani masalah stunting, yang merupakan isu kesehatan yang serius di wilayah tersebut. Salah satu regulasi yang menjadi

landasan dala Penanganan stunting adalah peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Isi kebijakan dari peraturan Bupati (Perbup) Poso Nomor 22 Tahun 2022 mengatur mengenai Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat upaya pencegahan dan pengurangan angka stunting secara terintegrasi di tingkatan desa di Kabupaten Poso. Pendekatan yang berbasis desa dianggap sangat penting karena desa adalah tempat utama dalam pelaksanaan program untuk mengatasi stunting. Kebijakan ini menyoroti perlunya integrasi serta koordinasi beragam program dan layanan yang berhubungan dengan pencegahan stunting di tingkat desa, mencakup intervensi gizi spesifik (seperti pemberian suplemen zat besi bagi ibu hamil) dan intervensi yang peka (seperti menyediakan air bersih dan kebersihan). Di samping itu, Perbup ini kemungkinan juga mengatur dan memperkuat peran serta tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelaksanaan berbagai intervensi untuk mempercepat penurunan stunting, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Kebijakan ini juga mungkin mencakup mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi guna memastikan program pengurangan stunting berjalan efektif di setiap desa. Berdasarkan informasi yang ada, Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 ini masih berlaku.

Kebijakan penanganan stunting yang diterapkan di Desa Wuasa, Kabupaten Poso, adalah wujud nyata dari Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa. Sebagai contoh desa yang dijadikan percontohan, Wuasa

menerapkan pendekatan integratif berbasis desa dengan memanfaatkan program unggulan daerah, seperti "Bunga Desa" yang menyediakan layanan publik terpadu. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita, pemberian suplementasi gizi, percepatan urusan administrasi kependudukan, serta pendidikan mengenai nutrisi seimbang dan pola asuh anak. Desa ini juga memaksimalkan penggunaan anggaran desa untuk pengembangan fasilitas kesehatan, program ketahanan pangan lokal, dan pendampingan masyarakat oleh fasilitator. Kerja sama antara berbagai sektor menjadi kunci sukses dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, TNI/Polri, dan komunitas.

Intervensi dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup intervensi spesifik yang berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan serta intervensi yang sensitif melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Hasilnya, Kabupaten Poso berhasil mengurangi jumlah desa yang tertinggal dan meningkatkan jumlah desa yang maju, di mana Program Bunga Desa mampu memberikan 9.342 layanan dalam satu pelaksanaan dengan tingkat partisipasi 69% pada hari pertama. Walaupun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses dan dana, upaya terus dilakukan dengan memperkuat sistem pemantauan, pendidikan yang berkelanjutan, dan penegasan kebijakan untuk daerah terpencil. Dengan komitmen yang terus menerus, Desa Wuasa menunjukkan potensi untuk menjadi model nasional dalam mempercepat penurunan stunting menuju target 14% pada tahun 2024.

Peraturan ini ditujukan untuk kelompok yang berisiko mengalami stunting, terutama pada anak-anak usia balita, wanita hamil, dan remaja perempuan.

Cakupannya mencakup tindakan gizi yang spesifik (seperti pemberian makanan tambahan dan suplemen) serta tindakan gizi yang peka (seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pendidikan mengenai gizi). Selain itu, Peraturan bupati ini juga mengatur keterlibatan dari berbagai sektor, termasuk dinas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan bupati ini menyoroti bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, puskesmas, desa, dan kelompok masyarakat sangatlah penting. Pembentukan tim yang fokus pada percepatan pengurangan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan bertujuan agar program dapat dijalankan secara terintegrasi. Setiap pihak yang terlibat memiliki tugas tertentu, seperti dinas kesehatan yang bertanggung jawab atas pemantauan gizi dan dinas PUPR yang berperan dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Poso melibatkan berbagai pihak yang bekerja secara terkoordinasi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Poso. Bupati Poso berperan sebagai penanggung jawab utama, memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah, Bupati memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan semua instansi terkait serta memastikan adanya komitmen politik dalam upaya penanganan stunting.

Di tingkat teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso menjadi sektor utama yang memimpin implementasi program-program ini. Dinas ini bertugas merancang strategi intervensi gizi, memantau status gizi balita, serta menyelenggarakan edukasi untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, dukungan dari berbagai dinas dan instansi terkait juga sangat penting, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (PMD) yang memperkuat peran desa dalam upaya pencegahan stunting, Dinas Pendidikan yang fokus pada edukasi gizi di sekolah-sekolah, Dinas Sosial yang menangani keluarga berisiko, serta Dinas PUPR yang berkontribusi dalam memperbaiki sanitasi dan memfasilitasi akses air bersih.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Poso. Tim ini bertanggung jawab untuk menyelaraskan program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memantau progres, dan mengevaluasi hasil dari intervensi yang dilakukan. Di lapangan, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan dasar, yang mencakup pemeriksaan untuk ibu hamil, balita, dan konseling gizi.

Pelibatan pemerintah Desa/Kelurahan dan Tim Pendamping Keluarga juga menjadi kunci keberhasilan program, mengingat bahwa intervensi terhadap stunting perlu menjangkau langsung sampai ke tingkat keluarga. Kader Desa dan pendamping keluarga bertugas dalam pendataan, pendampingan, serta memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan. Dengan adanya kolaborasi multisektor ini, diharapkan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Masalah yang muncul dari aspek komunikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenaistunting. Beberapa individu masih sulit menerima kenyataan

bahwa anak-anak mereka mengalami stunting atau mengalami gizi buruk. Masalah kedua yang muncul adalah terkait dengan sumber daya, yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran stunting antara pemerintah desa dan kader. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan yang ada. Untuk itu, penulis meneliti dengan judul “Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang ingin diajukan oleh penulis adalah: Bagaimana kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi mahasiswa, khususnya bagi mereka yang menempuh studi di bidang Ilmu Pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi para

peneliti yang ingin mendalami lebih jauh mengenai Kebijakan Penanganan Stunting.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat secara praktis memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam menerapkan konsep dan teori yang ada, seiring dengan kondisi nyata di lapangan mengenai Kebijakan Penanganan Stunting.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami hasil-hasil penelitian yang telah ada, yang memiliki relevansi sebagai bahan referensi, perbandingan, serta sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Meskipun secara khusus penelitian ini belum pernah dilakukan, terdapat beberapa penelitian serupa terkait Kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Dela Rosita Sari (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pemenang Kecamatan Pegelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021" mengkaji kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan stunting di Pekon Pemenang dengan menggunakan teori Jones (1984) yang terdiri dari organisasi, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat masalah seperti pemahaman masyarakat dan anggota tim Gebrak Princes tentang stunting masih rendah dan pola asuh orang tua di Pekon Pamenang masih kurang baik.

Syalsha Dila Advina Saragih (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Kota Subulussalam” mengkaji kesesuaian aspek fungsional, memfokuskan sistematis menurut teori Anderson (1975). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat masalah kurangnya edukasi terhadap ibu, tidak mau mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota subulussalam, memberikan makanan sembarangan terhadap anak dan faktor lingkungan minim literasi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah menunjukkan bahwa Kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah Kota Subulussalam bertujuan untuk mengatasi masalah stunting secara langsung dengan langkahlangkah konkret. Ini termasuk pemberian insentif fiskal, peningkatan koordinasi,tata kelola, intervensi sensitif, dan spesifik. Pada tahun 2023, pemerintah kota menargetkan penurunan angka stunting sebesar 13,02% dengan meningkatkan akses ibu hamil, kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang, dan alokasi anggaran khusus.

Eti Klasia Juliyanti (2022) Skripsi yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Didesa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat” mengkaji kesesuaian aspek fungsional, memfokuskan sistematis menurut teori Anderson (1975). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat masalah Kesadaran masyarakat terkait stunting sangat kurang seperti pengetahuan dan pencegahan stunting secara maksimal baik gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil,

balita dan pemenuhan kebutuhan gizi tersebut, hal ini disebabkan kurang nya sosialisasi dan pendampingan dari tenaga medis yang bertugas. Transaparansi pemerintah desa dalam pengalokasiaan dana desa dibidang kesehatan khususnya stunting sangat terbatas dan sulitnya memperoleh informasi terkait dana desa yang diperoleh dan digunakan setiap tahunnya dalam periode 5 tahun ini yaitu tahun 2017-2022 belakangan ini. Adapun hasil penelitian yang di temukan adalah menunjukan bahwa Kebijakan pemerintah desa Nanga Raya kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat dalam penanggulangan stunting masih belum jelas seperti pengalokasian dana anggaran terkait alat-alat yang digunakan oleh kader posyandu dalam pendeteksian stunting, keterbatasan fasilitas kesehatan seperti di Desa Nanga Raya hanya memiliki 2 pos kesehatan yaitu 1 Polindes yang terletak didusun Nanga Raya dan Poskesdes.

Rachman Yansari Fy (2023) Skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Proram Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau “ Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan kota Lubuklinggau. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Metter Van Hord yang terdiri dari sumber daya dan sikap para pelaksana. . Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdapat masalah angka stunting dari data yang disajikan di atas tersebut angka stunting di Kota Lubuklinggau masih terbilang cukup tinggi sebesar 19% padahal kota ini bisa menjadi contoh dan lebih unggul karena akses di wilayah ini lebih terjangkau. Adapun hasil penelitian yang di temukan menunjukan bahwa

implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di dinas kesehatan lubuklinggau menurut peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana serta komunikasi organisasi pelaksana sudah terimplementasi. Namun, yang masih menjadi penghambat adalah aspek sumberdaya yang kurang memadai dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat sekitar belum mendukung karena masih kurang pemahaman dan kesadaran mereka akan program ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari aspek teori, metode penelitian yang di gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian dilihat dari lokasi penelitian dan waktu yang di gunakan, perbedaan lainnya juga mencakupan dan fokus.

2.1.2 Landasan Teoritis Dan Kepustakaan Yang Relevan

2.1.2.1 Definisi Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di suatu negara atau wilayah tertentu. Dalam perannya ini, pemerintah bertindak sebagai pengatur yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, sekaligus menjaga ketertiban sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh John M. Scheb II, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta melaksanakan fungsi-fungsi penting lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah "pemerintah" mencakup semua cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai contoh, cabang legislatif memiliki tugas untuk merumuskan undang-undang, sementara cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah juga berperan sebagai penyedia layanan publik yang penting bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah mendanai dan mengelola lembaga-lembaga yang menyediakan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat (Mawaddah 2017). pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sebagai bentuk nyata dari fungsi negara kesejahteraan. pemerintah sangat berkorelasi dengan kemampuannya dalam menyediakan layanan publik yang merata dan berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, kinerja pemerintah menjadi objek kajian yang penting dalam mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kerangka hukum yang diperlukan, mengatur alokasi sumber daya, serta memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warga negara. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial serta menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi dialog dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Konsep pemerintahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem politik di setiap negara, dan

hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari para warganya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi untuk memastikan keadilan dan stabilitas. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan perpajakan, regulasi bisnis, serta perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidaksetaraan ekonomi. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup perumusan undang-undang, regulasi, serta kebijakan lainnya. Proses ini biasanya melibatkan pengambilan keputusan yang hati-hati dan didasarkan pada bukti yang kuat. Menurut (Thomas R. Dye) dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy*, penyusunan kebijakan merupakan langkah awal yang krusial dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dampaknya terhadap masyarakat.

2.1.2.2 Definisi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan di tingkat desa. Struktur pemerintahan ini dipimpin oleh Kepala Desa, yang didukung oleh perangkat Desa. Para pejabat yang tergabung dalam perangkat Desa ini memiliki peran penting dalam menangani administrasi dan menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur ini, terdapat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk mengatur dan

mengelola kepentingan masyarakat lokal. Kepala Desa dan BPD memiliki kedudukan yang setara sebagai lembaga desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Meskipun peran dan fungsi keduanya berbeda, mereka memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam menjalankan Pemerintahan Desa dengan efektif.

Dengan demikian, Kepala Desa sebagai pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang setara, karena keduanya merupakan lembaga atau organisasi di tingkat desa yang turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, mereka menjalin hubungan yang erat dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pada dasarnya, istilah "Pemerintah Desa" merujuk kepada individu yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Konsep "Pemerintah Desa" juga mencakup proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut oleh aparatur desa. Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mengelola pemerintahan di tingkat desa (Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2021). Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa beserta perangkatnya yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem kelembagaan yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta hubungan kerja di

dalamnya. Menurut Undang-Undang Desa, desa dipimpin oleh sekelompok pejabat yang dikenal sebagai pemerintah desa. Namun, sering kali terjadi kesalahpahaman di mana istilah pemerintah desa disalah artikan atau dipahami secara keliru sebagai pemerintahan desa. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang juga dapat dikenal dengan sebutan lain. Ia dibantu oleh perangkat Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa, serta Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun, serta sebutan lain yang relevan. Dengan kata lain, mereka memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa, di mana Kepala Desa berperan sebagai pemimpin dan perangkat Desa bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Dengan demikian, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang setara sebagai bagian dari pemerintahan desa. Keduanya berfungsi sebagai lembaga atau organisasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Meskipun masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, mereka menjalin hubungan yang erat dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Romadon 2024). Struktur organisasi desa mencerminkan pembagian peran yang sistematis antara Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif, perangkat desa sebagai pelaksana teknis administratif, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

2.1.2.3 Fungsi dan Peran Pemerintah Desa

Menurut penjelasan dari (Haria et al. 2023) Pemerintah Desa (Pemdes) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah di

tingkat Desa. Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat Desa, memimpin pelaksanaan pemerintahan desa dengan efisien. Pemdes memainkan peran krusial dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki tugas yang jelas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan warga, semua itu berlandaskan pada Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa memainkan berbagai peran penting. Di antara fungsi-fungsi tersebut, terdapat penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi tata praja, penetapan peraturan, pembinaan dalam masalah pertanahan, serta upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.

Pemdes bertanggung jawab atas berbagai aspek tata kelola desa, termasuk tata praja, penetapan regulasi lokal, pengelolaan pertanahan, dan upaya menjaga stabilitas sosial. Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan kompleksitas peran Pemdes sebagai lembaga yang berada di garis depan pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Oleh karena itu, efektivitas Pemdes dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia perangkat desa, serta dukungan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Desa memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengurangan stunting di tingkat desa. Berikut ini adalah fungsi dan peran yang di kemukakan oleh (Haria et al. 2023) yang di emban oleh pemerintah desa terkait dengan masalah stunting antara lain.

1. Penyediaan Aturan: Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan perangkat aturan yang dapat memberikan dasar hukum bagi setiap kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kejadian stunting pada balita. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengeluarkan peraturan desa (perdes) yang mendukung serta mempermudah pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi bagi ibu hamil dan bayi, seperti melalui program posyandu.

2. Pendampingan: Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendampingi ibu hamil beserta keluarganya. Dalam hal ini, pendampingan dapat dilakukan dengan cara mengarahkan dan memberikan motivasi agar ibu hamil dan keluarganya berperan aktif dalam menurunkan angka stunting pada balita. Pendampingan ini bisa berupa penyuluhan, diskusi, dan berbagai kegiatan lainnya.

3. Pendanaan: Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan anggaran desa yang bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan guna mengurangi prevalensi stunting pada balita. Koordinasi dan Pelaksanaan: Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengoordinasikan serta melaksanakan upaya Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. Dalam hal ini, kepala desa akan membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan koordinasi, menyinergikan berbagai kegiatan, dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di desa atau kelurahan.

4. Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah desa aktif melakukan sosialisasi mengenai pencegahan stunting kepada ibu hamil, ibu pasca melahirkan, serta masyarakat luas. Selain itu, pemerintah juga menyediakan informasi terkait stunting dan gizi secara komprehensif. Penggunaan media sosial menjadi salah satu cara efektif untuk

menyebarkan informasi kesehatan ini.

2.1.2.4 Kebijakan

Dalam jurnal yang di kemukakan oleh (Sitti Chaeriah Ahsan, La Samudia Dalili 2024) mendefinisikan Kebijakan adalah sebuah kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. Kebijakan dibuat untuk dapat membuat solusi akan problematika manusia yang bermacam-macam. Pemerintah merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pengambil alih kebijakan bagi rakyatnya, akan tetapi kadang kala kebijakan tersebut dapat diterima dan kadang pun ditolak oleh masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini, masalah yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi seperti ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malah mendelegitimasi pemerintah itu sendiri.

Dalam konsep yang di kemukakan (Kismartini 2019) Kebijakan merupakan hasil dari analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif, yang pada gilirannya mengarah pada pengambilan keputusan mengenai pilihan terbaik. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya sekadar keputusan yang diambil, tetapi juga melalui proses evaluasi dan pemilihan opsi yang paling sesuai untuk mencapai

tujuan yang diinginkan . Dalam ranah pemerintahan, kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian langkah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini meliputi tidak hanya keputusan yang harus diambil, tetapi juga aspek-aspek yang perlu dihindari oleh pemerintah. Kebijakan publik berfokus pada kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan sumber daya yang efisien.

Dalam hal ini beberapa ahli menulis tentang konsep kebijakan antara lain menurut Edward III didalam (MULYONO 2009) yang melihat kebijakan itu dari empat aspek terdiri dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Birokrasi penjelasannya sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Informasi mengenai kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait lainnya. Dimensi komunikasi meliputi transmisi informasi dan kejelasanInformasi. Semakin tinggi pemahaman terhadap suatu kebijakan, semakin rendah tingkat penolakan dan kesalahan dalam penerapannya.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks kebijakan mencakup berbagai elemen yang esensial untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Tidak hanya melibatkan tenaga kerja, sumber daya juga meliputi informasi, keahlian, otoritas, serta fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Disposisi merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau pejabat yang berwenang untuk menanggapi surat, laporan, atau masalah yang disampaikan kepadanya. Dalam bidang administrasi atau manajemen, disposisi sering kali berupa perintah, petunjuk, atau saran yang diberikan kepada staf atau pihak yang relevan untuk menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan. Disposisi juga dapat menggambarkan sikap atau kecenderungan individu untuk bertindak atau merespons sesuatu dengan cara tertentu.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pegawai pemerintah yang menjalankan tugas-tugas administratif dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi biasanya berbentuk piramida, di mana terdapat tingkatan atau lapisan yang berbeda, mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksana di tingkat bawah.

Selain definisi Kebijakan tersebut, Beberapa teori kebijakan menurut para ahli, antara lain sebagai berikut.

1. Menurut James E Anderson, di dalam buku (S 2025) Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan . Kebijakan merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Selain itu, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan

masalah tertentu. Bahwa dalam menentukan kebijakan, diperlukan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan itu, di mana pihak yang dimaksud di sini adalah pemerintah.

2. Menurut Natalia Artha Malau Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut tulisannya kebijakan itu adalah proses dimana individu atau kelompok lain ketika memilih hambatan terdapat solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang di temukan. Menurut tulisannya kebijakan adalah suatu bentuk tindakan yang di rancang untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk individu, kelompok maupun pemerintah dalam suatu konteks lingkungan tersebut. Dalam menuju tujuan tersebut pembuat kebijakan akan di hadapkan dengan hambatan dan tantangan. Namun, hambatan ini dapat di jadikan pluang untuk mencari solusi kreatif dan alternatif yang tepat.
3. Menurut Reno Affrian, dalam tulisannya Kebijakan terdiri dari komponen-komponen tujuan yang diinginkan (goal), rencana atau proposal untuk mencapai tujuan, program sebagai upaya berwenang mencapai tujuan, keputusan atau tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, dan efek atau akibat dari program. kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan akhir, tetapi sebagai rangkaian proses yang terorganisir mulai dari penetapan tujuan hingga evaluasi hasil, Yang dimana setiap tujuan yang di inginkan memerlukan proses untuk mencapai tujuan yang di inginkan, adapun

dalam tujuan ini memerlukan aktor-aktor yang berperan penting di dalamnya yang dimana aktor tersebut adalah pemerintah dan masyarakat, hambatan yang ditemukan dalam proses merupakan peluang untuk menemukan solusi yang tepat.

4. Menurut William N. Dunn, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan diambil oleh pejabat atau kelompok pejabat pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks situasi yang nyata. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, melainkan suatu proses yang terstruktur dan berorientasi pada pemecahan masalah publik. Dalam mencapai sebuah tujuan, definisi ini menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tertentu juga diperlukan aktor-aktor yang membuat keputusan dalam memecahkan masalah publik, jadi dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah stunting, dengan target menurunkan prevalensinya hingga 14% pada tahun 2024. Langkah-langkah kebijakan ini mencakup berbagai intervensi yang ditujukan untuk berbagai tahap kehidupan, mulai dari periode sebelum kehamilan hingga pada anak usia dini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada intervensi gizi, tetapi juga berupaya memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Salah satu langkah penting yang diambil adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita. Ini mencakup pemberian suplemen gizi, imunisasi, serta edukasi mengenai pola makan seimbang (Amud, n.d.). Selain program layanan kesehatan, Pemerintah juga harus memperhatikan aspek sanitasi

yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih juga digalakkan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Kerja sama antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi ini dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan prevalensi stunting dapat menurun secara signifikan, sehingga mencapai target 14% pada tahun 2024.

2.1.2.5 Konsep Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini dapat dikenali melalui tinggi badan anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu nilai z-score kurang dari -2,00 standar deviasi (SD) untuk kategori stunted, dan kurang dari -3,00 SD untuk kategori severely stunted (Rizki, n.d.). Stunting mencerminkan kondisi kekurangan gizi yang berlangsung lama dan sering kali tidak disadari sejak dini. Ditandai dengan postur tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya, stunting menjadi indikator adanya masalah serius dalam asupan nutrisi dan kesehatan anak.

Sudut pandang ahli gizi yang di tulis oleh (Boucot and Poinar Jr. 2020) Dalam situasi ini, anak mengalami kekurangan asupan gizi yang memadai selama periode waktu yang cukup lama. Penelitian menunjukkan bahwa stunting tidak hanya berdampak buruk pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Ahli gizi menjelaskan bahwa kekurangan

asupan gizi dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan fisik dan kemampuan prestasi belajar pada anak.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan gizi pada periode krusial, khususnya selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga usia dua tahun. Pada fase ini, kebutuhan nutrisi sangat tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka risiko terjadinya stunting akan semakin meningkat (H.R. Rasuna Said 2016). Asupan gizi sangat diperlukan selama 1000 hari pertama kehidupan untuk kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak jika tidak terpenuhi maka akan menyebabkan risiko terjadinya stunting.

WHO juga menegaskan bahwa stunting adalah kondisi yang bersifat irreversibel, yang berarti bahwa jika seorang anak telah mengalami stunting, pemulihan penuh terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif mereka sangat sulit dicapai. Dalam buku yang ditulis oleh (Rachman 2018) pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini, melalui peningkatan asupan gizi bagi ibu hamil dan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak. Secara umum, para ahli menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kekurangan gizi, infeksi yang terjadi berulang kali, dan pola asuh yang kurang memadai. Penanganan stunting memerlukan pendekatan yang multidisipliner, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, demi memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak-anak di bawah usia lima tahun akibat kekurangan gizi kronis. Gejala utama dari stunting adalah tinggi atau panjang badan yang berada di bawah standar yang ditetapkan. Anak-anak dikategorikan mengalami stunting jika tinggi atau panjang badan mereka berada di bawah minus dua standar deviasi (-2SD) dari nilai rata-rata anak seusianya. Pencegahan stunting sangat memerlukan intervensi yang tepat, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Upaya ini mencakup perbaikan dalam pola makan, pola asuh, serta sanitasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran guna mengurangi prevalensi stunting itu sendiri. Prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai angka 30,8% pada tahun 2018. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi stunting tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia (Endy Paryanto Prawirohartono 2019). Dalam upaya pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup pada anak. Dalam hal ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran guna untuk mengurangi prevalensi stunting.

2.1.2.6 Program Penanganan Stunting

Penanganan stunting merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mencegah dan mengurangi angka prevalensi stunting, yang merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai oleh tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Fenomena ini umumnya terjadi akibat kekurangan gizi

kronis dan infeksi yang berulang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai strategi dan intervensi yang terpadu, melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka intervensi stunting di Indonesia, terdapat dua pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik secara langsung menargetkan penyebab utama stunting, melalui berbagai program seperti pemberian ASI eksklusif, penyediaan makanan pendamping ASI (MP-ASI), suplementasi gizi (misalnya tablet tambah darah dan zink), serta imunisasi lengkap. Selain itu, pencegahan dan penanganan penyakit seperti diare dan malaria juga menjadi bagian penting dari intervensi ini (Asiva Noor Rachmayani 2015). Dalam program penanganan stunting di perlukan berbagai strategi dan intervensi yang melibatkan kolaborasi antara lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kolaborasi yang di lakukan dapat membantu tercapainya target tersebut.

Program penanganan stunting dilakukan dengan pendekatan holistik melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting). Strategi ini terdiri atas lima pilar utama, yaitu: komitmen kepemimpinan, kampanye nasional untuk perubahan perilaku, konvergensi program lintas sektor, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi program. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, disertai penguatan kebijakan dan alokasi anggaran khusus berdasarkan Perpres 2020.

Berikut adalah beberapa langkah yang diambil untuk menangani stunting (Ummah 2019).

1. Program Intervensi Spesifik

Program intervensi spesifik adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk secara langsung menangani penyebab stunting, yang sering kali berkaitan dengan kekurangan gizi serta kesehatan ibu dan anak. Kementerian Kesehatan Indonesia telah menetapkan 11 program intervensi spesifik yang difokuskan pada dua fase penting dalam pertumbuhan anak, yakni sebelum dan setelah kelahiran. Berikut adalah penjelasan mengenai program-program tersebut: 11 Program Intervensi Spesifik.

1. Skrining Anemia
1. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Remaja Putri
2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)
3. Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Ibu Hamil
4. Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu dengan Risiko Kekurangan Energi Protein (KEK)
5. Pemantauan Tumbuh Kembang Balita
6. ASI Eksklusif
7. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita
8. Tatalaksana Balita dengan Masalah Gizi
9. Peningkatan Cakupan Imunisasi
10. Edukasi Remaja Putri, Ibu Hamil, dan Keluarga Balita
11. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

PMT atau Pemberian Makanan Tambahan, adalah penyediaan makanan tambahan yang diberikan bersamaan dengan makanan utama yang dikonsumsi setiap hari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa PMT dapat terdiri dari makanan lokal maupun makanan olahan yang aman dan bergizi. Program ini ditujukan untuk kelompok sasaran yang berisiko, seperti balita berusia 6-59 bulan dan ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Makanan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi masing-masing sasaran. Tujuan PMT adalah untuk membantu memulihkan kondisi gizi dan kesehatan anak serta mencegah masalah gizi yang lebih serius, seperti stunting dan malnutrisi.

2. Pendekatan Berbasis Keluarga

Pendekatan berbasis keluarga merupakan strategi yang diterapkan dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan anggota keluarga. Strategi ini menggabungkan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan kesehatan masyarakat (UKM), dengan memberikan penekanan pada peran keluarga sebagai unit utama dalam mendukung kesehatan dan perkembangan anak. Pendekatan ini menyoroti pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses perawatan dan pendidikan anak. Dalam konteks kesehatan, tujuan pendekatan ini adalah untuk memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah secara rutin. Dengan demikian, puskesmas dapat mendata dan memahami kondisi kesehatan setiap anggota keluarga, yang selanjutnya memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3. Strategi Nasional Pencepatan Penanganan Stunting

Strategi Nasional Percepatan Penanganan Stunting (Stranas Stunting) adalah dokumen kebijakan yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah stunting secara menyeluruh. Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Stranas Stunting berfungsi sebagai panduan strategis yang mencakup intervensi pencegahan stunting yang terukur dalam bingkai kebijakan dan lembaga yang ada. Dokumen ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat memahami peran mereka masing-masing dalam upaya pencegahan stunting. Dengan adanya Stranas, diharapkan akan tercipta koordinasi yang lebih baik antara berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting.

2.1.2.7 Penanganan Stunting

Penanganan stunting merupakan serangkaian langkah strategis yang disusun oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengganggu pertumbuhan anak. Dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, kebijakan ini mengambil pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam upaya nasional untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 (Kuncoro 2023)

terciptanya lingkungan yang sehat, termasuk peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, edukasi gizi, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kedua jenis intervensi ini saling melengkapi, sehingga mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam upaya penanganan stunting. Pemerintah menyusun serangkaian langkah-langkah yang strategis dalam penanganan stunting dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, pemerintah melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan, yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta organisasi internasional. Pendekatan konvergensi diadopsi untuk memastikan agar program-program dari berbagai sektor saling mendukung dan dapat menjangkau sasaran yang tepat. Salah satu contoh yang menjadi fokus utama adalah program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mengingat periode ini dianggap sebagai waktu yang krusial untuk mencegah terjadinya stunting.

Kebijakan penanganan stunting dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi guna menjamin efektivitas implementasinya. Pemerintah secara rutin melakukan surveilans terhadap kelompok sasaran, seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak berusia 0-59 bulan. Data yang diperoleh dari surveilans tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masalah spesifik di masing-masing daerah, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Secara keseluruhan, kebijakan penanganan stunting di Indonesia adalah sebuah upaya komprehensif yang menggabungkan berbagai program dari

berbagai sektor dengan pendekatan berbasis bukti. Dengan adanya regulasi yang jelas serta keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan kebijakan ini dapat secara signifikan memperbaiki status gizi masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan (Putri, Sulastri, and Apsari 2023). Pemerintah secara rutin melakukan surveilans untuk mengidentifikasi masalah spesifik di masing-masing daerah, dengan adanya pemantauan ini dapat membantu meluncurkan perbaikan status gizi masyarakat.

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan stunting, terutama dalam upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat guna mencegah dan mengurangi angka prevalensi stunting. Berikut adalah penjelasan tentang strategi komunikasi yang digunakan dalam penanganan stunting (Azahra, Hana, and Arifiyani 2023).

1. Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP): Strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mengadopsi perilaku hidup sehat yang mendukung pencegahan stunting. KPP melibatkan advokasi, mobilisasi sosial, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya gizi dan asuhan yang baik
2. Komunikasi Antar Pribadi (KAP): Metode ini efektif dalam menyampaikan pesan secara langsung dan personal kepada masyarakat, terutama ibu dan keluarga. KAP membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang gizi seimbang dan pola asuh yang baik.

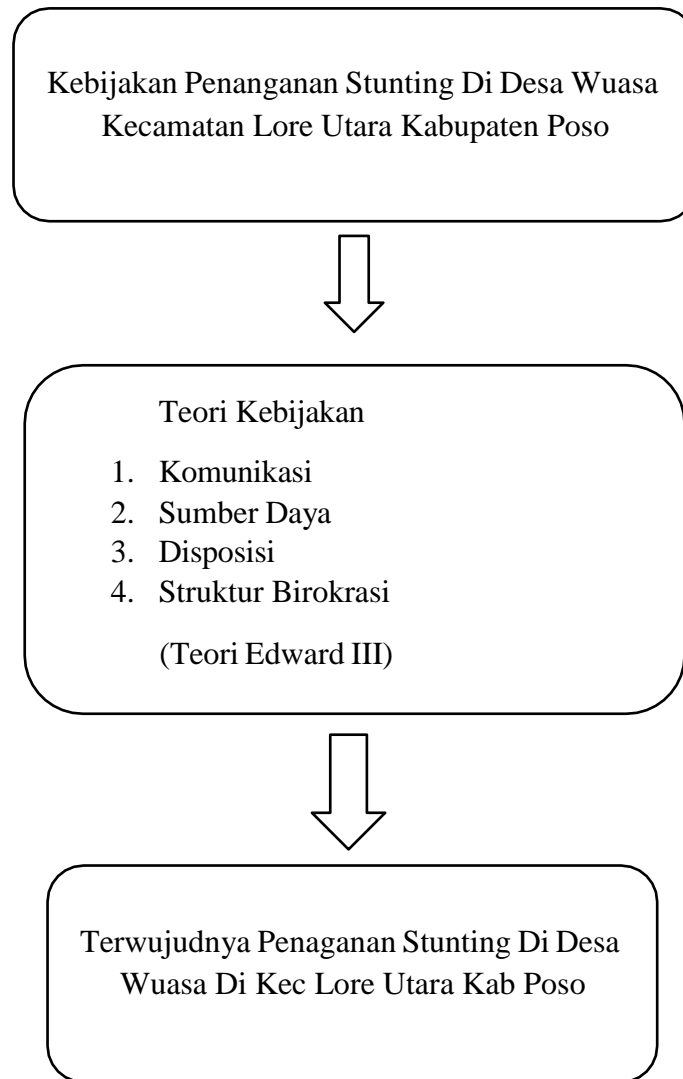
3. Penggunaan Media Sosial dan Cetak: Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media cetak seperti leaflet dan poster digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan stunting secara luas dan efektif.

2.2 Alur Pikir

Alur pikir merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui visualisasi yang sederhana. Dalam alur pikir, penulis menyajikan gambaran visual mengenai langkah-langkah dalam pemecahan masalah, mencakup persoalan utama, kondisi yang diharapkan, landasan pemikiran, serta pengaruh dari lingkungan strategis yang dapat memengaruhi proses pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan teori yang ada, penulis beranggapan bahwa penting untuk memahami Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Untuk itu, penulis melakukan penilaian pengawasan menggunakan pendekatan dari Teori George C. Edward III (2010), yang menyoroti tiga kunci utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Gambar.1.1. Alur Pikir

Alur Pikir



Sumber: Peneliti 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Dan Tipe Penelitian

3.1.1 Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut (Zuchri Abdussamad, 2021), penelitian kualitatif berlandaskan pada tujuan untuk mengkaji kondisi objek yang bersifat alamiah. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menggali informasi sedalam- dalamnya semakin mendalam data yang diperoleh, semakin tinggi kualitas penelitian tersebut. Metode ini menekankan pada kelengkapan dan kedalaman informasi yang didapat, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih fokus pada jumlah data. Dengan demikian, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan dalam penanganan stunting, khususnya Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

3.1.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini membutuhkan pendekatan yang tepat untuk memperoleh data yang akurat, sehingga diperlukan metode penelitian yang mampu menjamin adanya keterkaitan antara berbagai komponen yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut (Rusandi and Muhammad Rusli 2021) metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta

memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat tanpa melakukan manipulasi terhadap yang diteliti. Pendekatan ini mengandalkan data kualitatif, yang umumnya berupa kata-kata, gambar, atau deskripsi naratif, untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu situasi atau kondisi sosial. Dalam hal ini, Peneliti menggambarkan dan menjelaskan tentang Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

3.2. Definisi Konsep

Berdasarkan uraian pengertian dan teori yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini di fokuskan pada Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wuasa Kec Lore Utara Kab Poso. Penelitian ini menggunakan teori yang di kembangkan oleh George C Edward III, yang isi kebijakan yang menjelaskan tentang keberhasilan suatu kebijakan dan program. Adapun isi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi : Dalam upaya menangani stunting, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi mengenai stunting, langkah-langkah pencegahan, serta cara penanganannya kepada warga Desa Wuasa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Wuasa bersama Puskesmas berusaha menyampaikan informasi tentang stunting dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Sumber Daya : Dalam upaya penanganan stunting di perlukan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Dalam konteks kebijakan penanganan stunting, tenaga kesehatan, petugas gizi, dan lain-lain yang terlibat dalam penanganan stunting, anggaran yang dialokasikan untuk

program penanganan stunting, fasilitas kesehatan dan peralatan yang di perlukan.

3. Disposisi : Dalam konteks kebijakan penanganan stunting, disposisi dapat berarti kemampuan untuk mengubah perilaku masyarakat khususnya Desa Wuasa untuk mengubah perilaku mereka dalam hal pencegahan stunting, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi atau melakukan aktivitas fisik yang teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi disposisi seperti lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Agar mencapai tujuan pengurangan stunting, dapat mematuhi kebijakan penanganan stunting, seperti mengikuti program imunisasi atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur.
4. Birokrasi : Dalam struktur organisasi penanganan stunting Di Desa Wuasa , Kepala Desa bekerjasama dengan Puskesmas Wuasa membentuk struktur organisasi yang menentukan tugas masing-masing serta mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi antar anggota tim.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

1. Data primer, data ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa Wuasa, Kepala Puskesmas, Pengawas BKKBN, Ketua Kader Posyandu, dan Masyarakat untuk memahami bagaimana bentuk Penanganan Stunting.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumentasi resmi dari Pemerintah Desa Wuasa berupa website (<https://wuasa.digitaldesa.id/>) ,dokumen resmi yang di berikan Kepala Puskesmas , Pengawas BKKBN,

dokumen resmi terkait stunting di Desa Wuasa yang di berikan oleh Ketua Kader Stunting, buku terkait stunting, jurnal terkait stunting, jurnal terkait kebijakan penanganan stunting dan dokumen terkait kebijakan. Seperti apa cara penanganan stunting yang baik, dan laporan jumlah stunting yang di jadikan referensi untuk mengetahui sejauh mana program penanganan stunting tersebut.

3.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yang berarti bahwa informan ditentukan dengan sengaja karena dianggap memiliki pemahaman yang relevan terhadap kajian penelitian yang akan dianalisis. Informan yang terlibat terdiri dari:

1. Pemerintah Desa (Budi Utomo Mondolu, S.Pd., M.Si)
2. Kepala Puskesmas (Helvi Wati Gae S.K.M)
3. Pegawai BKKBN (James Ngkiro, Sos)
4. Kader Posyandu (Lita Sore)
5. Ibu Balita yang terdampak stunting (Septivio Meralisa Abu)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti: artikel jurnal terkait stunting dan kebijakan, situs web pemerintah (<https://wuasa.digitaldesa.id/>) , buku terkait Stunting, buku terkait kebijakan, Laporan jumlah angka stunting, serta sumber lainnya. Data sekunder ini berguna untuk menambah data-data dari hasil wawancara yang di peroleh dari data primer.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. Di bawah ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data digunakan antara lain (Teniwut 2022) :

a. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan secara langsung di lokasi penelitian mengenai bagaimana penanganan stunting. Melalui observasi ini peneliti dapat mengetahui bagaimana bentuk penanganan stunting. Serta peneliti juga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Observasi di lakukan selama tujuh bulan dan Observasi secara langsung di lakukan selama lima bulan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk interaksi tanya jawab antara peneliti dan informan yang memiliki peran penting dalam bentuk penanganan dan faktor pendukung dan penghambat penanganan stunting. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari

Kepala Desa Wuasa, Kepala Puskesmas, Pengawas BKKBN, Ketua Kader Stunting dan Masyarakat untuk mendapatkan perspektif mengenai bentuk penanganan stunting. Wawancara ini dilakukan secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung yang mencakup laporan resmi terkait Stunting, serta sumber-sumber lainnya yang diperlukan peneliti.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang menjadi salah satu perangkat untuk menggali data primer dari informan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri, menggunakan alat dokumentasi serta alat tulis menulis untuk mengumpulkan pedoman wawancara dan logbook penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif atau kuantitatif, termasuk penyusunan, penyaringan, pengkodean, dan penginterpretasian data untuk mengungkap pola atau temuan yang bermakna. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014) sebagai berikut:

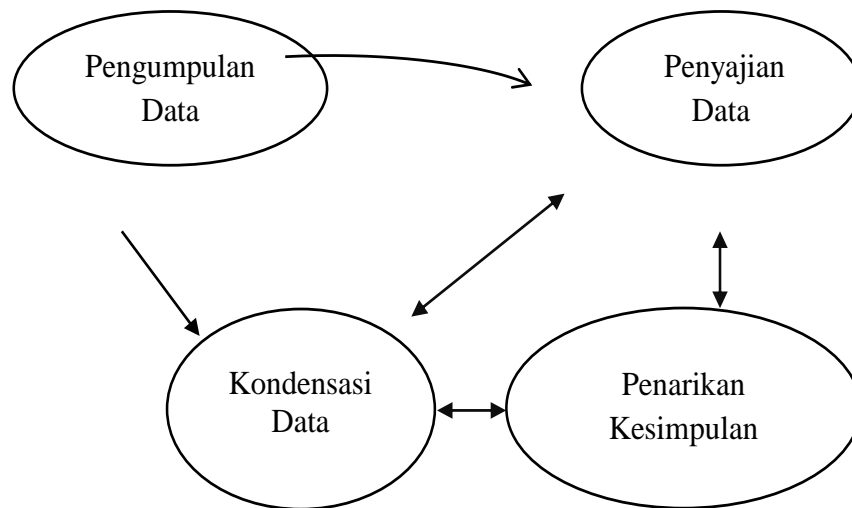
1. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil wawancara Penulis

melakukan pengumpulan data selama observasi tujuh bulan, dalam observasi ini peneliti melakukan wawancara dengan lima informan yang terdiri dari Kepala Desa Wuasa, Kepala Puskesmas Wuasa, Penanggung Jawab BKKBN, Ketua kader Stunting, Dan Masyarakat.

2. Kondensasi Data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Pada penelitian ini peneliti mengkondensasi data dengan cara menggali data lebih dalam, menentukan data yang relevan, menyusun data agar sesuai dengan pertanyaan, membuang data yang tidak relevan, menata data agar mudah di tarik ke kesimpulan.

3. Penyajian Data, analisis data adalah display data. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan/verifikasi. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal.



Gambar 2.1 Model Interaksi

Menurut Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014)

3.7 Penentuan Lokasi Peneliti

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan data awal yang diperoleh dari desa tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi desa ini adalah fluktuasi angka stunting yang terjadi setiap tahun. Ditemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai stunting menjadi salah satu faktor penyebab, sehingga beberapa individu tidak menyadari bahwa anak-anak mereka terdampak stunting. Selain itu, terdapat juga masalah terkait sumber daya, yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran stunting antara pemerintah desa dan para kader.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran lokasi penelitian

Desa Wuasa terletak di sebuah wilayah yang dikelilingi oleh batas-batas alam dan administratif yang jelas. Di sebelah utara, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Watumaeta, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Desa Alitupu. Di sisi selatan, Desa Kaduwaa menjadi batas wilayah, dan di sebelah barat, desa ini berbatasan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Dengan luas wilayah mencapai 28.390.000 meter persegi, desa ini memiliki ruang yang cukup luas untuk aktivitas pertanian, pemukiman, dan pelestarian alam. Letaknya yang berdekatan dengan taman nasional juga memberikan keunikan tersendiri, baik dari segi ekosistem maupun potensi wisata alam.

Desa ini dihuni oleh 2.444 jiwa, yang hidup berdampingan dengan alam sekitarnya. Keberadaan Taman Nasional Lore Lindu di bagian barat tidak hanya menjadi batas wilayah, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat, baik dari segi sumber daya alam maupun budaya. Dengan batas-batas desa yang jelas, masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Letaknya yang strategis, diapit oleh desa-desa lain dan kawasan konservasi, menjadikan desa ini sebagai bagian penting dari ekosistem dan tata ruang wilayah sekitarnya.

4.2 Demografi

Dinamika sosial sangat bergantung pada jumlah penduduk suatu Desa. Jumlah penduduk di Desa Wuasa dari aspek jenis kelamin, jumlah laki-laki dan perempuan sebagai berikut.

Tabel 1.3
Data Kependudukan Desa Wuasa

Laki-laki	Perempuan
1.259	1.185
Jumlah	2.444

Sumber : Kantor Desa Wuasa 2025

4.3 Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki aktifitas yang signifikan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai risiko stunting dan cara untuk mencegahnya. Dengan mengadakan pertemuan warga, posyandu, serta bekerja sama dengan kader kesehatan, pemerintah desa membagikan informasi penting tentang pola makan yang seimbang, cara pengasuhan yang tepat, serta pentingnya kebersihan dan akses air bersih. Edukasi ini juga ditujukan kepada calon pengantin dan wanita hamil agar mereka mendapatkan informasi yang diperlukan sejak awal tentang pencegahan stunting. Salah satu fungsi penting dari pemerintah desa adalah untuk mengumpulkan data tentang balita dan anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Dengan menggunakan informasi dari posyandu dan puskesmas, pemerintah desa dapat mengidentifikasi keluarga yang memerlukan bantuan khusus. Pengawasan secara teratur terhadap perkembangan anak melalui penimbangan

setiap bulan dan pencatatan status gizi sangat membantu dalam mendeteksi stunting pada tahap awal sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Di samping itu, desa juga dapat melaksanakan program pelatihan bagi kader posyandu dan kader gizi guna memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya stunting. Penanganan stunting memerlukan kerja sama antara pemerintah desa, puskesmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi di daerah. Pemerintah desa memiliki peran untuk menjembatani pertemuan antar sektor guna merancang strategi untuk menurunkan angka stunting, seperti kampanye vaksinasi, distribusi vitamin A, atau program pendampingan bagi keluarga yang berisiko tinggi. Dengan adanya kolaborasi ini, usaha untuk mencegah stunting bisa menjadi lebih terarah dan efisien. Berikut adalah struktur pemerintahan di Desa Wuasa.



Sumber : Kantor Desa Wuasa 2025

4.4 Jumlah Stunting Di Desa Wuasa

Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Program Bunga Desa pada Februari 2023, yang mencakup layanan kesehatan termasuk penanganan stunting. Meskipun tidak disebutkan angka pasti kasus stunting di Desa Wuasa, program ini memberikan bantuan gizi seperti susu dan multivitamin untuk balita stunting, serta intervensi lain seperti sertifikat tanah dan bantuan operasional sekolah. Secara umum, Kabupaten Poso masih menghadapi tantangan stunting dengan prevalensi 26,5% pada 2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI), meskipun ada upaya penurunan melalui program kolaboratif seperti Desa Siaran Stunting dan pemenuhan sanitasi dasar.

Tabel 1.2 Jumlah Stunting Tahun 2025

Jumlah stunting cempaka 1	4 orang
Jumlah stunting cempaka 2	4 orang

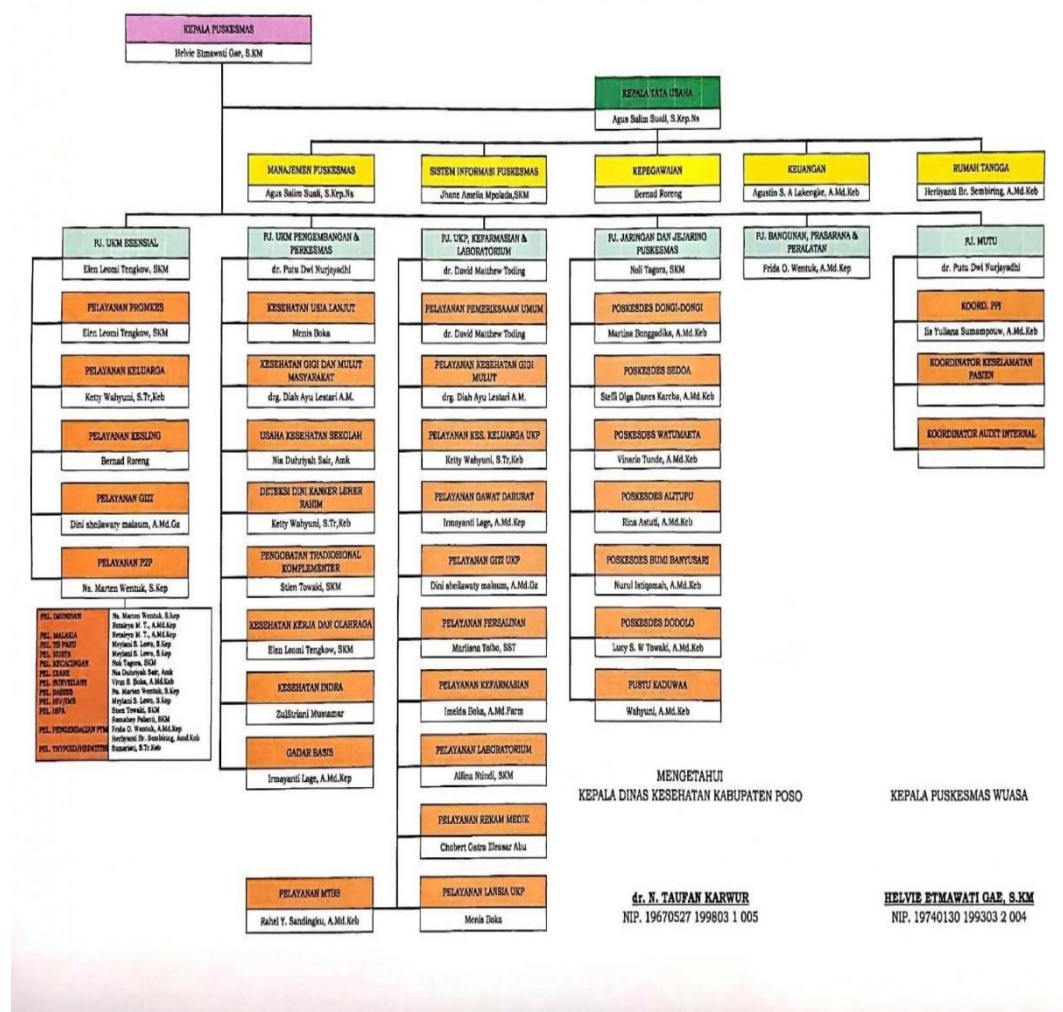
Sumber : Kader Posyandu 2025

4.5 Puskesmas

Puskesmas memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan program untuk mencegah dan mengurangi stunting, yang meliputi pengawasan pertumbuhan anak kecil, penyediaan makanan tambahan, serta memberikan informasi gizi kepada masyarakat. Puskesmas berkolaborasi dengan kepala desa dan kader posyandu untuk mengoptimalkan upaya pencegahan stunting. Sebagai contoh, kader posyandu didorong agar lebih disiplin dalam kehadiran dan pelaksanaan program, sementara masyarakat diajak untuk terlibat lebih aktif. Puskesmas juga

memiliki tanggung jawab untuk mengenali elemen-elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan program, seperti keterlibatan masyarakat dan ketersediaan sarana. Puskesmas juga mengajarkan tentang signifikansi gizi dari masa kehamilan sampai anak mencapai usia 2 tahun, sebab stunting seringkali terjadi akibat kurangnya pemenuhan gizi di periode penting ini.

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS WUASA KABUPATEN POSO



Sumber: Puskesmas Wuasa 2025

4.6 Posyandu

Kinerja Posyandu dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia menunjukkan berbagai usaha yang terarah, termasuk pemantauan status gizi, intervensi langsung, penyuluhan, dan kerjasama dengan banyak pihak. Pengawasan Berkala dan Identifikasi Awal Posyandu memiliki peran utama dalam memantau perkembangan balita melalui berbagai kegiatan, seperti mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepalanya. Misalnya: Desa Wuasa melaksanakan program POSTING (Posyandu Stunting) setiap Rabu pada minggu ketiga setiap bulan untuk memantau balita yang mengalami stunting. Desa Wuasa melakukan "Bulan Timbang" secara serentak di seluruh Posyandu pada bulan Mei 2025 untuk memperbaiki data mengenai stunting dan memberikan intervensi yang tepat, seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan).



Sumber : Kader Posyandu 2025

4.7 Kader Stunting

Kinerja para kader dalam menghadapi masalah stunting di Desa Wuasa memiliki beberapa aspek, termasuk identifikasi awal, intervensi nutrisi, penyuluhan, kerja sama antar sektor, dan pengumpulan data. Kader stunting memegang peran kunci dalam pemantauan antropometri balita secara berkala melalui kegiatan Posyandu bulanan. Setiap bulan, kader melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala balita sebagai indikator pertumbuhan. Sebagai contoh, Kabupaten Madiun pada tahun 2025 telah meningkatkan akurasi pengukuran dengan menggunakan stadiometer digital dalam pemantauan rutin ini. Selain pengukuran fisik, kader juga melakukan screening risiko stunting dengan memantau balita yang memiliki z-score <-2 SD berdasarkan standar WHO, kemudian melaporkan kasus yang terdeteksi ke puskesmas untuk tindak lanjut. Untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data, kader melakukan pencatatan terintegrasi melalui sistem elektronik seperti e-PPGBM (Electronic Pencatatan Pemantauan Gizi Berbasis Masyarakat) atau Aplikasi SEHATi, yang memungkinkan pemantauan perkembangan balita secara lebih sistematis dan terpadu.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penanganan Stunting

Dalam Penanganan stunting, pemerintah menerapkan Kebijakan Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyoroti empat elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan organisasi birokrasi sebagai berikut:

5.1.1 Komunikasi

Analisis pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa menggunakan perspektif Teori dari Edward III menunjukkan adanya dinamika komunikasi yang penting. Desa Wuasa, sebagai bagian dari komunitas Kabupaten Poso yang kaya akan budaya lokal Lore, merupakan gambaran jelas dari konteks tinggi. Dalam budaya ini, informasi sering kali disampaikan secara tidak langsung, mengandalkan pemahaman yang mendalam mengenai norma, nilai-nilai, hubungan personal, stratifikasi sosial, serta situasi yang telah ada.

Cara komunikasi di sini bersifat simbolik dan sangat tergantung pada jaringan sosial yang erat serta kepercayaan yang terjalin lama antara warga dan tokoh otoritas tradisional seperti pemuka adat dan pemimpin masyarakat. Kebijakan penanganan stunting yang bersifat teknis dan datang dari pemerintah pusat atau daerah umumnya disusun dengan pendekatan konteks rendah, yang lebih menekankan pada pesan yang jelas, prosedur tertulis, instruksi langsung, dan

pendekatan yang lebih umum. Perbedaan antara cara komunikasi kebijakan (konteks rendah) dan budaya komunikasi masyarakat sasaran (konteks tinggi) di Wuasa menimbulkan tantangan yang signifikan. Pesan-pesan penting mengenai pengasuhan, gizi seimbang, sanitasi, dan penggunaan posyandu yang disampaikan secara resmi melalui poster, brosur, atau ceramah sering kali tidak sepenuhnya diterima atau diimplementasikan karena kurangnya perhatian terhadap saluran komunikasi tradisional (seperti musyawarah adat atau komunikasi melalui tokoh yang dihormati), serta kurangnya pemanfaatan simbol, cerita, atau metafora lokal yang memiliki kedalaman emosional dan kultural yang kuat bagi masyarakat. Akibatnya, meskipun ada intervensi fisik (seperti suplementasi gizi dan penyediaan fasilitas sanitasi) yang mungkin tersedia, perubahan perilaku berkelanjutan yang menjadi inti dari penanganan stunting terhambat oleh kesenjangan komunikasi ini. Keberhasilan kebijakan di tingkat desa sangat tergantung pada kemampuan kader kesehatan, bidan desa, dan perangkat desa untuk berperan sebagai "penerjemah budaya", yang mampu mengubah pesan teknis kebijakan menjadi bentuk yang lebih implisit, kontekstual, dan disampaikan melalui saluran serta figur yang sudah memiliki legitimasi dan kepercayaan tinggi dalam struktur sosial budaya masyarakat Wuasa (Sazali 2023).

Wawancara Menurut Bapak Budi Utomo Mondolu umur 42 Tahun, Selaku Kepala Desa Wuasa

“Menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa ini menghadapi tantangan utama dalam aspek komunikasi. Kepala Desa menjelaskan bahwa materi edukasi seperti poster dan brosur seringkali kurang dipahami warga karena tingkat literasi yang bervariasi dan bahasa yang terlalu teknis. Masyarakat kami lebih percaya dan paham kalau informasi disampaikan menggunakan bahasa pasar atau lewat musyawarah adat”. (Hasil wawancara Juni 2025)

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada pengadaan program penanganan stunting yang di sampaikan melalui brusor/poster belum berhasil untuk di pahami masyarakat di karenakan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut masih kurang. Sehingga hal ini belum dapat di katakan optimal, karena dalam mengimplementasikan hal tersebut belum berhasil. Hal ini di dasarkan pada teori George C. Edward III dalam hal komunikasi agar menggunakan bahasa yang sederhana dan berbasis keseharian warga, Kemudian bisa juga melibatkan tokoh adat dan forum musyawarah desa agar meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap pesan-pesan kesehatan dan juga bisa menggunakan media komunikasi selain brosur, bisa juga menggunakan video pendek berbahasa lokal dan drama desa.

Penerapan kebijakan untuk mengurangi stunting di tingkat Desa masih menghadapi masalah komunikasi yang cukup besar, meskipun Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 telah mengatur penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan pendekatan yang berakar pada budaya setempat. Di lapangan, materi edukasi seperti poster dan brosur cenderung memakai istilah teknis yang tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat, sehingga menghambat penyampaian informasi. Keinginan masyarakat yang lebih mudah menerima informasi melalui bahasa sehari-hari dan forum musyawarah adat sebenarnya sesuai dengan semangat partisipatif yang diharapkan dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perubahan materi teknis ke dalam bentuk yang lebih relevan dan pemanfaatan saluran komunikasi tradisional agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik budaya lokal.

Wawancara Menurut Ibu Helvi Wati Gae umur 54 Tahun selaku Kepala Puskesmas Wuasa

“Implementasi penanganan masalah stunting di Desa Wuasa mengalami hambatan dalam aspek komunikasi yang cukup besar. Dia menyampaikan bahwa informasi teknis (protokol gizi, panduan sanitasi) dari pemerintah sering kali tidak diterima dengan baik akibat kurangnya pemahaman dalam hal literasi dan penggunaan bahasa yang terlalu rumit. "Poster dan brosur yang memuat istilah medis seperti 'zinc', 'balita wasting', atau '1000 HPK' malah membuat masyarakat merasa bingung. “ (Hasil wawancara Juni 2025)

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang di lakukan oleh peneliti pada program penanganan stunting yang di sampaikan melalui brosur/poster belum berhasil untuk di pahami masyarakat di karenakan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut masih kurang, sehingga hal ini belum dapat di katakan optimal, karena dalam mengimplementasikan hal tersebut belum berhasil. Hal ini di dasarkan pada teori George C. Edward III dalam hal komunikasi sehingga pemerintah dan tenaga kesehatan perlu membuat materi edukasi dengan bahasa yang sederhana seperti istilah-istilah medis sebaiknya di jelaskan menggunakan analogi lokal yang familiar bagi masyarakat.

Implementasi program pengurangan stunting di Desa Wuasa menghadapi tantangan utama dalam hal komunikasi, di mana konten edukasi yang disediakan oleh pemerintah masih memakai istilah teknis seperti "zinc" dan "1000 HPK" sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting menjadi rendah. Sebenarnya, Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 dengan jelas mengharuskan penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang sesuai dengan budaya setempat. Namun, dalam pelaksanaannya, kader kesehatan belum memiliki

kemampuan yang cukup untuk mengubah materi teknis tersebut menjadi bahasa yang lebih praktis, sementara materi yang dibagikan masih cenderung rumit. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menyederhanakan materi edukasi dengan pendekatan visual dan bahasa yang lebih sederhana, meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan komunikasi yang efektif, serta menciptakan sistem umpan balik untuk menilai efektivitas materi yang diberikan. Dengan demikian, meskipun regulasi yang ada sudah cukup bagus, penerapannya di lapangan masih membutuhkan penyesuaian dalam strategi komunikasi agar dapat mencapai target penurunan stunting secara maksimal.

Wawancara menurut Bapak James Ngkiro umur 54 Tahun selaku penanggung jawab BKKBN Kecamatan Lore Utara

“Berdasarkan percakapan dengan Penanggung jawab BKKBN, pelaksanaan program penanganan stunting di Desa Wuasa menghadapi masalah dalam komunikasi yang berhubungan dengan pendekatan keluarga (PK-21/21). Bapak tersebut menyampaikan bahwa bahan sosialisasi dari BKKBN (seperti modul PIS-PK/Pendataan Keluarga) sering kali terlalu rumit dan kurang relevan bagi masyarakat. "Sebagai contoh, istilah 'intervensi spesifik-sensitif' atau 'remaja calon pengantin' membuat para ibu merasa bingung. Mereka lebih memahami jika kita menggunakan istilah sehari-hari seperti 'persiapan untuk menjadi pengantin yang sehat' atau 'gizi untuk calon bayi. “ (Hasil wawancara juni 2025)

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang di lakukan oleh peneliti pada program penanganan stunting yang di sampaikan melalui brosur/poster belum berhasil untuk di pahami masyarakat di karenakan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut masih kurang, sehingga hal ini belum dapat di katakan optimal, karena dalam mengimplementasikan hal tersebut belum berhasil. Hal ini di dasarkan pada teori George C. Edward III dalam hal komunikasi disaran kan agar materi program PK-21 disesuaikan dengan kemampuan literasi masyarakat, di jelaskan

menggunakan bahasa sehari-hari dan juga menyederhanakan bahasa agar mudah dipahami oleh masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dalam uji coba dan pengembangan bahasa agar pendekatan yang digunakan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks Desa Wuasa.

Implementasi program penanganan stunting di Desa Wuasa dengan pendekatan keluarga PK-21/21 masih menghadapi masalah komunikasi, di mana materi sosialisasi seperti modul PIS-PK menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat, seperti "intervensi spesifik-sensitif". Hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022, yang mendorong penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan budaya setempat. Untuk meningkatkan keefektifan program, perlu dilakukan perubahan materi teknis menjadi istilah yang lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, dengan mengganti istilah teknis menjadi "persiapan pengantin sehat" atau "gizi untuk calon bayi", sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan dan prinsip kebijakan yang telah ditetapkan oleh komunitas lokal.

Wawancara menurut Ibu Lita Sore Umur 39 Tahun Selaku Ketua Kader Stunting

“Khususnya dengan memanfaatkan "Bahasa Sehari-hari" untuk memastikan pemahaman, merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa. Masukan dari masyarakat mengenai kunjungan ke rumah sangat berarti sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk pendekatan komunikasi yang lebih penuh empati, bersifat pribadi, dan tanpa stigma, serta menjadi alat penting untuk mengutarakan pesan bahwa stunting dapat diatasi dan diperbaiki. Bantuan dari Puskesmas dalam melatih kader dan strategi penjangkauan memiliki peranan yang sangat penting”

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang di lakukan oleh peneliti pada program penanganan stunting yang di sampaikan melalui brosur/poster belum berhasil untuk di pahami masyarakat di karenakan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut masih kurang, sehingga hal ini belum dapat di katakan optimal, karena dalam mengimplementasikan hal tersebut belum berhasil. Hal ini di dasarkan pada teori George C. Edward III dalam hal komunikasi agar memprioritaskan materi dan penyuluhan tentang stunting harus di sampaikan dalam bahasa lokal hal ini meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memanfaatkan kunjungan rumah bukan hanya untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk mendengarkan masukan dari masyarakat.

Berdasarkan masukan dari warga Desa Wuasa, penggunaan bahasa yang biasa dan cara komunikasi yang penuh empati melalui kunjungan ke rumah telah terbukti menjadi elemen penting dalam keberhasilan penanganan stunting, yang sejalan dengan tujuan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 terkait Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini secara khusus mengatur penggunaan bahasa yang sederhana dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan budaya setempat, serta menekankan pentingnya peran kader kesehatan yang berpengalaman dalam menyampaikan informasi kesehatan. Bantuan dari Puskesmas dalam melatih kader dan mengembangkan strategi pendekatan yang bersifat pribadi dan tidak diskriminatif adalah penerapan nyata dari kebijakan tersebut, yang tidak hanya menjamin pemahaman warga tetapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan yang lebih baik dalam usaha menurunkan stunting di tingkat desa.

Selain itu ada hasil Wawancara menurut Ibu Meralisa umur 25 Tahun selaku masyarakat Desa Wuasa

“Komunikasi menjadi kunci keberhasilan penanganan stunting di Desa Wuasa. Penggunaan "Bahasa Pasar" oleh kader dan penerapan kunjungan rumah yang diusulkan masyarakat merupakan strategi komunikasi praktis yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi stigma, memberikan pendampingan personal, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas program penanganan stunting secara keseluruhan. Keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan kesehatan yang kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami dan melalui saluran yang membangun kepercayaan dan empati.”

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang di lakukan oleh peneliti pada program penanganan stunting yang di sampaikan melalui brosur/poster belum berhasil untuk di pahami masyarakat di karenakan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut masih kurang, sehingga hal ini belum dapat di katakan optimal, karena dalam mengimplementasikan hal tersebut belum berhasil. Hal ini di dasarkan pada teori George C. Edward III dalam hal komunikasi agar penyampaianya lebih menggunakan bahasa sehari-hari agar masyarakat tidak kebingungan dan saluran komunikasi program harus memungkinkan dialog terbuka agar masyarakat merasa di dengar, di libatkan, dan menjadi bagian dari solusi penanganan stunting.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Wuasa, penggunaan "Bahasa Pasar" dan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat terbukti menjadi metode penting dalam mengatasi masalah stunting. Ini sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 yang mengedepankan percepatan penurunan stunting. Peraturan ini menekankan bahwa pentingnya bahasa yang mudah dipahami serta pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan budaya setempat, dan juga menekankan tanggung jawab kader kesehatan dalam mengubah

informasi yang bersifat teknis menjadi pesan yang lebih relevan. Pelaksanaan kunjungan rumah serta penggunaan bahasa sehari-hari tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tetapi juga memperkuat rasa saling percaya dan empati, yang merupakan prinsip dasar dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang praktis ini menjadi alat penting dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata yang efisien di kalangan masyarakat.

5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa. Ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, bidan, dan nutrisisionis di Puskesmas pembantu atau di desa sendiri sangat terbatas, baik secara jumlah maupun cakupan wilayah pelayanan mengingat kondisi geografis yang berbukit dan tersebar. Ketergantungan besar pada kader Posyandu, yang umumnya merupakan relawan dengan pengetahuan dasar dan waktu terbatas, seringkali menghambat pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, konseling gizi yang memadai, serta pelacakan kasus secara proaktif. Selain itu, kapasitas kader dan petugas lapangan dalam hal identifikasi dini faktor risiko stunting, teknik komunikasi perubahan perilaku (KIE) yang efektif, serta penggunaan alat ukur antropometri yang akurat masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan intensif.

Di sisi sumber daya fisik dan infrastruktur, Desa Wuasa menghadapi kendala signifikan. Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak (jamban sehat) masih belum merata, terutama di dusun-dusun terpencil, yang merupakan faktor determinan langsung terhadap kejadian infeksi penyebab stunting. Fasilitas

kesehatan dasar seperti Posyandu seringkali memiliki bangunan dan peralatan terbatas, termasuk kurangnya alat antropometri yang presisi (seperti *length board* untuk bayi) atau timbangan yang terkalibrasi. Keterbatasan transportasi dan jalan yang sulit, terutama di musim hujan, menghambat distribusi logistik (seperti tablet tambah darah, PMT pemulihan) serta akses keluarga ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan pengobatan. Minimnya infrastruktur pendukung seperti sarana olahraga komunitas atau ruang laktasi juga mempengaruhi upaya promosi pola hidup sehat.

Sumber daya finansial juga menjadi faktor krusial. Dana yang dialokasikan khusus untuk penanganan stunting, baik dari APBD Kabupaten Poso, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, maupun Dana Desa (DD), seringkali belum memadai secara kuantitas dan belum terfokus optimal pada intervensi spesifik penurunan stunting di Desa Wuasa. Alokasi Dana Desa untuk sektor kesehatan dan air bersih-sanitasi perlu diperbesar dan diprioritaskan. Keterlambatan penyaluran dana dan prosedur administrasi yang rumit kerap menghambat pelaksanaan kegiatan lapangan secara tepat waktu. Ketergantungan pada dana eksternal (hibah/CSR) yang sifatnya proyek dan temporer juga menimbulkan masalah keberlanjutan program. Selain itu, kapasitas perencanaan dan penganggaran desa (Musrenbangdes) dalam menyusun kegiatan spesifik berbasis data stunting lokal serta mengintegrasikan berbagai sumber dana (APBD, DD, BOK Puskesmas) secara sinergis masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

“Wawancara Menurut Ibu Helvi Wati Gae umur 54 Tahun selaku Kepala Puskesmas Wuasa”

“Menyatakan Bahwa Puskesmas mengerahkan tenaga khusus seperti bidan desa, petugas gizi, dokter, dan kader kesehatan (termasuk kader stunting khusus) untuk penanganan stunting. Pelatihan rutin diberikan kepada petugas gizi dan kader guna meningkatkan kompetensi dalam edukasi gizi, pemantauan balita, serta pengelolaan intervensi. Dalam program *Integrasi Layanan Primer (ILP)*, perawat di *Pustu* (Puskesmas Pembantu) bertugas memantau langsung kasus stunting di lapangan dan melapor ke puskesmas”

Dari hasil wawancara bersama Ibu Helvi selaku Kepala Puskesmas, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa puskesmas telah memberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan edukasi gizi bagi kader stunting khusus dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terlihat upaya yang konkrit dalam mengoptimalkan sumber daya manusia untuk penanganan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa unsur sumber daya manusia telah terpenuhi sesuai dengan dimensi teori George C. Edward III. Lebih lanjut, pelatihan rutin yang diberikan kepada petugas gizi dan kader menjadi indikator adanya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, sehingga mereka mampu menjalankan fungsi edukasi gizi, pemantauan balita, dan pengelolaan intervensi secara lebih efektif. Tidak hanya itu, dalam skema Integrasi Layanan Primer (ILP), perawat di Pustu juga memiliki peran strategis dalam pemantauan langsung kasus stunting dan menyampaikan laporan ke Puskesmas induk.

Peran Puskesmas dalam mengatasi stunting di Desa Wuasa adalah contoh nyata dari penerapan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022, dengan melibatkan tenaga kesehatan khusus seperti bidan desa, petugas gizi, dan kader kesehatan yang menerima pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dalam edukasi gizi serta pemantauan anak balita. Program Integrasi

Layanan Primer (ILP) memanfaatkan Pustu sebagai garda terdepan dalam memantau kasus stunting yang dilaporkan ke puskesmas, sejalan dengan kebijakan yang menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dan pemantauan secara rutin. Walaupun upaya ini telah memperkuat layanan kesehatan dasar, masih ada tantangan seperti hambatan komunikasi dan penyesuaian materi edukasi yang belum optimal yang perlu diatasi agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Bapak Budi Utomo Mondolu umur 42 tahun selaku Kepala Desa Wuasa

“Menyatakan bahwa Alokasi Anggaran dan Kecukupan Dana Pemerintah Desa Wuasa mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting pada tahun 2025, dengan perubahan fokus dari sekadar insentif kader menjadi termasuk penyediaan makanan tambahan bagi balita (baik yang terindikasi stunting maupun sebagai upaya pencegahan). Besaran anggaran ini bersifat variatif karena disesuaikan dengan jumlah kader aktif dan jumlah balita yang menjadi sasaran di posyandu. Meskipun ada alokasi, Kepala Desa secara tegas menyatakan bahwa dana yang tersedia belum mencukupi sepenuhnya untuk membiayai seluruh kebutuhan program, seperti investasi gizi, pelatihan kader, dan edukasi kesehatan secara optimal. Desa berharap adanya tambahan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi untuk menutup kekurangan ini”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Budi selaku Kepala Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti penyediaan makanan tambahan sudah terrealisasikan dengan baik, bukan hanya makanan tambahan tetapi ada juga vitamin dan susu yang di berikan pada anak yang terindikasi Stunting. Tetapi hasil observasi yang di lakukan peneliti bersama Bapak Budi ternyata anggaran yang di alokasikan masih kurang cukup di karenakan adanya perubahan fokus penyediaan

makanan tambahan bagi yang terindikasi stunting maupun yang dalam upaya. Dan ada beberapa pencegahan stunting. Oleh karena itu, Bapak Budi selaku Kepala Desa secara eksplisit memohon dukungan tambahan dari pemerintah tingkat kabupaten (Dinas Kesehatan Kabupaten Poso) dan provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah). Dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa, ketersediaan anggaran merupakan bagian penting dari aspek sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam teori George C. Edward III. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen perencanaan desa tahun 2025, pemerintah desa telah mengalokasikan dana khusus untuk penanganan stunting, yang mencakup bukan hanya insentif kader, tetapi juga penyediaan makanan tambahan untuk balita sebagai upaya intervensi dan pencegahan. Ini menunjukkan adanya komitmen fiskal dari level desa dalam mendukung kebijakan nasional.

Desa Wuasa telah menetapkan anggaran khusus untuk menangani stunting pada tahun 2025 dengan mengubah fokus dari insentif kader menjadi penyediaan makanan tambahan untuk balita, sesuai dengan arahan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022. Namun, dana yang dialokasikan masih belum mencukupi kebutuhan ideal untuk investasi gizi, pelatihan kader, dan pendidikan kesehatan. Sesuai dengan kebijakan yang mengatur dukungan keuangan dari pemerintah pusat, desa mengharapkan adanya tambahan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi untuk menutupi kekurangan anggaran dan memastikan efektivitas program percepatan penanganan stunting melalui intervensi langsung yang terarah.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Bapak James Ngkiro umur 54

Tahun selaku penanggung jawab BKKBN Kecamatan Lore Utara

“Menyatakan Mengenai alokasi dana, sumber pendanaan untuk program percepatan penurunan stunting dialokasikan oleh pemerintah kecamatan. Dana tersebut digunakan khusus untuk mendukung kegiatan pertemuan koordinasi yang melibatkan kader stunting dan masyarakat. Fokus penggunaannya adalah untuk intervensi kesehatan ibu dan anak guna mempercepat penurunan prevalensi stunting. Dalam hal sumber daya manusia, BKKBN secara aktif melibatkan multi-pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan bersama Puskesmas (dalam penyusunan langkah teknis penanganan stunting), dinas OPD terkait di tingkat kabupaten, serta instansi lain yang berkompeten. Kolaborasi ini bertujuan memastikan integrasi program dan optimalisasi peran masing-masing lembaga.

Dari hasil wawancara bersama Bapak James selaku penanggung jawab BKKBN di kecamatan lore utara, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa mengenai alokasi dana, dana tersebut khusus di gunakan untuk mendukung kegiatan pertemuan yang melibatkan kader stunting dan masyarakat. Maka dari pertemuan tersebut sehingga kontribusi nyata tingkat kecamatan dalam pendanaan penanganan stunting melalui alokasi dana khusus. Pemerintah Kecamatan Lore Utara secara aktif mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di wilayahnya Desa Wuasa. Dalam perspektif teori George C. Edward III, sumber daya tidak hanya mencakup dana, tetapi juga sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan yang memadai. Diketahui bahwa alokasi dana untuk percepatan penurunan stunting di Desa Wuasa turut didukung oleh pemerintah kecamatan, dengan fokus penggunaan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan kader dan masyarakat. Ini menunjukkan adanya komitmen fiskal lintas level pemerintahan, meskipun terbatas pada aspek koordinatif. Dari sisi sumber daya manusia, BKKBN berperan aktif dalam

mengorganisasi kolaborasi multipihak, termasuk Puskesmas, OPD terkait di tingkat kabupaten, dan instansi teknis lainnya. Sinergi ini mencerminkan upaya penguatan kapasitas pelaksana program melalui distribusi peran dan spesialisasi antar lembaga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022, pemerintah kecamatan telah menyiapkan anggaran untuk program pengurangan stunting yang menitikberatkan pada pertemuan koordinasi kader serta intervensi kesehatan bagi ibu dan anak, sejalan dengan prinsip pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam kebijakan tersebut. Kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan yang dipimpin oleh BKKBN bersinergi dengan Puskesmas dan dinas OPD terkait juga menunjukkan pelaksanaan dari integrasi program yang diamanatkan dalam peraturan ini. Namun, tantangan seperti kurangnya dana dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik memerlukan peningkatan kerjasama melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus, forum koordinasi secara teratur, serta sistem pemantauan yang ketat agar program dapat berjalan efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Ibu Lita Sore Umur 39 Tahun

Selaku Ketua Kader Stunting

“menyatakan saya sebagai Kader posyandu aktif menjalankan perannya dalam penanganan stunting, meski menghadapi tantangan komunikasi awal dan resistensi dari sebagian orang tua. Koordinasi dengan tenaga kesehatan (bidan, gizi) berjalan rutin. Kebutuhan utama adalah penguatan pemahaman kader tentang stunting itu sendiri melalui pelatihan lebih lanjut dan peningkatan dukungan anggaran dari tingkat kabupaten. Penyebab stunting di desa bersifat multifaktor, dengan fokus pada gizi ibu hamil dan isu kehamilan remaja”

Dari hasil wawancara bersama Ibu Lita selaku ketua Kader Stunting, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa di dalam hal ini di perlukan penguatan pemahaman bagi kader dalam pelatihan lebih lanjut dan peningkatan dukungan anggaran seperti yang sudah di sampaikan oleh Kepala Desa Wuasa. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi dari sebagian orang tua yang awalnya enggan menerima pemantauan serta kesulitan komunikasi dalam menyampaikan pentingnya pencegahan stunting, kader Posyandu di bawah kepemimpinan Ibu Lita tetap konsisten menjalankan perannya. Dalam kerangka teori George C. Edward III, sumber daya merupakan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup kecukupan dana, tenaga pelaksana, pengetahuan teknis, serta sarana dan prasarana yang memadai. Pengalaman saya sebagai kader posyandu dalam penanganan stunting mencerminkan adanya tantangan serius dalam aspek ini. Meskipun saya aktif menjalankan peran dan koordinasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan dan ahli gizi berlangsung secara rutin, keterbatasan pemahaman tentang stunting di kalangan kader masih menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan kurangnya sumber daya dalam bentuk pengetahuan teknis yang semestinya diperoleh melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, dukungan anggaran dari tingkat kabupaten yang belum optimal memperkuat kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan kapasitas pelaksana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa penguatan sumber daya, baik dalam aspek keahlian maupun dukungan finansial, pelaksanaan kebijakan stunting di desa sulit mencapai hasil yang maksimal. Maka, sejalan dengan teori Edward III, penguatan sumber daya menjadi prioritas mutlak untuk mendorong efektivitas program penanganan stunting. Hal ini

penting mengingat kompleksitas penyebab stunting di desa Wuasa, yang tidak hanya bersumber dari aspek gizi ibu hamil tetapi juga diperparah oleh tingginya kasus kehamilan remaja.

Peran yang diambil oleh kader posyandu dalam menangani stunting sesuai dengan instruksi Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 menjadikan kader sebagai garda terdepan program melalui kegiatan pemantauan gizi, dukungan untuk keluarga, serta pendidikan masyarakat. Tantangan dalam komunikasi dan penolakan yang dialami oleh kader menandakan perlunya penerapan pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang lebih fleksibel, sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan tersebut. Pentingnya pelatihan yang berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan kader serta dukungan dana dari tingkat kabupaten juga sejalan dengan ketentuan peraturan yang mengharuskan penguatan sumber daya manusia dan penyediaan dana khusus. Pengetahuan mengenai penyebab stunting yang bersifat multifaktorial, terutama yang berkaitan dengan gizi ibu hamil dan kehamilan pada remaja, memperkuat pendekatan menyeluruh dalam kebijakan yang menekankan intervensi yang spesifik dan sensitif serta pendekatan siklus hidup secara menyeluruh.

Selain itu ada hasil wawancara Bersama Ibu Meralisa umur 25 Tahun selaku masyarakat Desa Wuasa

“Menyatakan Masyarakat menerima penyuluhan tentang gizi anak dan pencegahan stunting terutama dari pihak kabupaten. Pesan kunci yang diingat adalah pentingnya pola hidup sehat, terutama kebersihan dan perhatian pada ibu hamil. Posyandu/Poskesdes menyediakan sarana dasar seperti timbangan bayi dan Kartu Menuju Sehat (KMS). Makanan Tambahan (PMT) juga tersedia, meskipun pemberiannya tidak rutin dan sering terkendala masalah pendanaan seperti keterlambatan pencairan dana. Bantuan lain seperti vitamin (tablet tambah darah) dan beras fortifikasi

pernah diberikan, sebagian berasal dari pihak eksternal (misalnya kepolisian). Untuk infrastruktur pendukung, sanitasi dan air bersih di desa Wuasa dinilai sudah memadai ("100% zaman sehat"), meskipun sumber air bersih bervariasi (ada yang dari saluran khusus, ada yang masih mengandalkan air PAM)"

Dari hasil wawancara bersama Ibu Meralisa selaku masyarakat Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa terkendalanya pendanaan yang membuat pemberian makanan tambahan tidak rutin di adakan di karenakan keterlambatan pencairan dana. Dalam hal ini, Keterlibatan pihak eksternal seperti pihak kepolisian dan pihak tentara juga sangat membantu. Menurut pengamatan yang peneliti hasilkan bahwa setiap pihak eksternal akan menanggung tambahan gizi untuk satu anak yang terindikasi stunting, dalam hal ini masyarakat Desa Wuasa sangat berterima kasih atas partisipasi yang telah di berikan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ketersediaan dan kualitas sumber daya merupakan faktor penentu efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Di desa Wuasa, masyarakat telah mendapatkan penyuluhan gizi dan pencegahan stunting dari pihak kabupaten, menandakan adanya upaya penyediaan sumber daya informasi. Pesan utama yang diterima masyarakat seperti pentingnya kebersihan dan perhatian terhadap ibu hamil mencerminkan keberhasilan awal dalam diseminasi pengetahuan. Namun, aspek lain dari sumber daya masih menunjukkan ketimpangan. Posyandu dan Poskesdes telah menyediakan sarana dasar seperti timbangan bayi dan Kartu Menuju Sehat (KMS), serta intervensi gizi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan suplemen (vitamin dan tablet tambah darah). Meski demikian, ketidakrutinan distribusi PMT akibat keterlambatan pencairan dana mencerminkan hambatan pada aspek sumber daya finansial dan

administratif. Bantuan dari pihak eksternal seperti kepolisian menunjukkan bahwa ketergantungan pada dukungan non-pemerintah masih terjadi. Di sisi lain, infrastruktur sanitasi dan air bersih dinilai cukup baik oleh masyarakat, namun perbedaan sumber air menunjukkan adanya ketimpangan akses.

Berdasarkan wawancara tentang penerimaan masyarakat terhadap program pengurangan stunting dan hubungannya dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah menunjukkan perkembangan yang signifikan walaupun masih juga menghadapi beberapa tantangan. Penyuluhan gizi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Perbup mengenai Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang fleksibel, sedangkan ketersediaan alat dasar di posyandu seperti timbangan bayi dan KMS mengikuti ketentuan dalam penguatan layanan kesehatan dasar. Pemberian PMT, vitamin, dan beras fortifikasi mencerminkan pelaksanaan intervensi spesifik yang diatur dalam kebijakan, meskipun keterlambatan dalam pencairan dana menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pembiayaan. Keadaan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih yang memadai di Desa Wuasa mendukung pelaksanaan intervensi sensitif yang diatur dalam peraturan, sehingga menciptakan situasi yang mendukung untuk percepatan penurunan stunting secara menyeluruh.

5.1.3 Disposisi

Disposisi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wuasa merupakan respons krusial terhadap prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Desa Wuasa, dengan karakteristik geografis yang berbukit dan akses terbatas, menghadapi kendala dalam pelayanan kesehatan dasar, pola asuh, serta

ketersediaan pangan bergizi. Kebijakan ini didorong oleh data yang menunjukkan bahwa anak-anak di desa ini rentan terhadap gangguan pertumbuhan kronis akibat kombinasi faktor kemiskinan, kurangnya pemahaman gizi, sanitasi yang buruk, dan infeksi berulang. Penanganan stunting di Wuasa menjadi prioritas untuk memutus siklus dampak jangka panjangnya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan desa.

Kebijakan ini menetapkan strategi intervensi terintegrasi yang menasar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai jendela kritis. Intervensi spesifik meliputi Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan kehamilan berkualitas, promosi ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita di posyandu), pendidikan gizi dan pola asuh bagi orang tua melalui pendampingan kader dan penyuluhan, serta perbaikan akses air bersih dan sanitasi (WASH) untuk mengurangi infeksi. Program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita kurang gizi serta diversifikasi pangan lokal berbasis potensi desa juga menjadi komponen kunci untuk menjamin kecukupan asupan nutrisi.

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Pemerintah Desa Wuasa berperan sebagai koordinator utama, memberdayakan kader posyandu dan tim penggerak PKK untuk pelaksanaan di lapangan. Sinergi dengan Puskesmas Lore Utara sangat vital dalam penyediaan layanan kesehatan dan pelatihan teknis. Keterlibatan tokoh masyarakat dan agama diperlukan untuk mengubah norma sosial dan perilaku. Dukungan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Poso serta Kementerian Kesehatan juga menjadi penopang penting. Pendekatan berbasis

data melalui pemantauan kasus stunting secara berkala diharapkan dapat mengukur efektivitas intervensi dan memastikan kebijakan tepat sasaran secara berkelanjutan.

“Wawancara Menurut Ibu Helvi Wati Gae umur 54 Tahun selaku Kepala Puskesmas Wuasa”

“menyatakan bahwa Disposisi penanganan stunting bagi Puskesmas Wuasa bersifat sangat prioritas dan strategis: “Ya, sangat prioritas sekali. Ini merupakan program nasional.” Komitmen tinggi ini didorong oleh kesadaran bahwa stunting berdampak jangka panjang pada kualitas generasi penerus. Kepala Puskesmas menekankan konsekuensi fatal jika tidak diprioritaskan: “Kalau tidak kita prioritaskan, stunting akan berdampak pada generasi kedepan melahirkan generasi yang tidak cerdas.” Bukti konkret disposisi ini terlihat dari capaian Puskesmas Wuasa sebagai juara terbaik penanganan stunting di Kabupaten Poso, dengan hanya 20 balita stunting ringan dari total 800 balita (2024-2025). Prestasi ini menunjukkan alokasi sumber daya, inovasi program (seperti PKK-CG Stunting dan Ina Uma Mehaile), serta koordinasi intensif lintas sektor yang dilakukan secara konsisten. Prioritas ini juga tercermin dalam integrasi penanganan stunting ke dalam seluruh siklus hidup (remaja, ibu hamil, balita) melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP).

Dari hasil wawancara bersama Ibu Helvi selaku Kepala Puskesmas, sesuai pengamatan peneliti bahwa penanganan stunting di Puskesmas Wuasa telah menjadi fokus utama dan strategis, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Puskesmas yang menekankan bahwa program ini bersifat nasional dan perlu mendapat perhatian yang mendalam. Tingginya komitmen ini muncul karena pemahaman akan konsekuensi jangka panjang stunting terhadap kualitas sumber daya manusia, yang jika tidak segera ditangani, dapat menghasilkan generasi yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan kognitif dan produktivitas. Keberhasilan Puskesmas Wuasa dalam menurunkan angka stunting hanya 20 balita dengan stunting ringan dari keseluruhan 800 balita (2024–2025) menunjukkan keefektifan dari kebijakan dan pelaksanaan program yang ada. Hal ini didukung oleh pengelolaan sumber daya yang baik, berbagai inovasi seperti PKK-CG Stunting dan

Ina Uma Mehaile, serta kerjasama antar sektor yang terus menerus. Selain itu, pendekatan menyeluruh melalui Program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mencakup seluruh siklus kehidupan mulai dari remaja, ibu hamil, hingga balita meningkatkan upaya untuk mencegah dan menangani stunting secara menyeluruh. Dalam teori kebijakan George C. Edward III, disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Disposisi yang positif dan penuh komitmen menjadi prasyarat penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Di Puskesmas Wuasa, disposisi terhadap penanganan stunting menunjukkan derajat prioritas yang sangat tinggi, sebagaimana diungkapkan langsung oleh kepala Puskesmas bahwa program ini merupakan prioritas nasional dan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang. Komitmen ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga terbukti dalam pencapaian konkret, Puskesmas Wuasa meraih peringkat terbaik dalam penanganan stunting di Kabupaten Poso, dengan prevalensi hanya 20 kasus stunting ringan dari total 800 balita. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya memahami urgensi masalah, tetapi juga menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengalokasikan sumber daya, mengembangkan inovasi program seperti PKK-CG Stunting dan Ina Uma Mehaile, serta membangun koordinasi lintas sektor yang konsisten.

Puskesmas Wuasa telah dengan baik menerapkan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 dengan menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas baik di tingkat nasional maupun daerah, yang diimplementasikan melalui pengintegrasian layanan yang berfokus pada siklus hidup dalam program Integrasi

Layanan Primer (ILP). Kerjasama yang kuat dengan pemerintah desa, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat, yang didukung oleh inovasi program seperti PKK-CG Stunting dan Ina Uma Mehaile, telah berhasil mencapai hasil yang signifikan yaitu penurunan angka stunting hingga hanya 20 balita dengan stunting ringan dari total 800 balita. Penghargaan sebagai yang terbaik dalam penanganan stunting di Kabupaten Poso menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dengan komitmen tinggi dan pendekatan yang tepat dapat mencapai sasaran meskipun masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran dan kerjasama yang berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan program.

Selain itu ada hasil wawancara Menurut Bapak Budi Utomo Mondolu umur 42 Tahun, Selaku Kepala Desa Wuasa

“menyatakan saya Kepala desa dan jajaran langsung terjun dalam penanganan kasus melalui posyandu, termasuk dengan menambah anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita (baik yang terindikasi stunting maupun sebagai upaya pencegahan) dan lansia. Terhadap setiap laporan atau temuan kasus stunting, pemerintah desa bersikap sigap dan mendorong kader untuk proaktif. Untuk memastikan kebijakan penanganan stunting diimplementasikan dengan baik, langkah konkret yang diambil adalah melakukan sosialisasi kesehatan secara intensif, berkolaborasi dengan PKK dan kader. Fokus sosialisasi adalah pada pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil (sebelum bersalin) dan ibu menyusui, serta mendorong kehadiran mereka di posyandu”.

Dari Hasil wawancara bersama Bapak Budi selaku kepala Desa Wuasa, sesuai pengamatan peneliti bahwa pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan timnya menunjukkan keseriusan yang jelas dalam mengatasi masalah stunting, dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan posyandu. Untuk memastikan program berjalan efektif, pemerintah desa melakukan sosialisasi kesehatan yang intensif melalui kerja sama dengan PKK dan kader posyandu,

dengan fokus utama pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Upaya ini diperkuat dengan mendorong partisipasi kelompok sasaran di posyandu, sehingga intervensi gizi dan pemantauan kesehatan bisa dilaksanakan secara rutin. Dalam teori George C. Edward III disposisi, kepala desa menunjukkan disposisi yang sangat kuat terhadap penanganan stunting di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan posyandu, termasuk pengalokasian tambahan anggaran desa untuk pemberian makanan tambahan (PMT) tidak hanya bagi balita yang terindikasi stunting, tetapi juga untuk upaya pencegahan dan perhatian pada lansia. Tindakan cepat terhadap setiap laporan kasus stunting, serta dorongan kepada kader agar lebih proaktif, menunjukkan responsif yang tinggi terhadap situasi di lapangan. Langkah konkret lainnya, seperti sosialisasi kesehatan yang intensif bekerja sama dengan kader, serta penekanan pada pentingnya gizi bagi ibu hamil dan menyusui, semakin menegaskan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat desa memiliki kesadaran tinggi terhadap dampak jangka panjang stunting dan berkomitmen untuk mencegahnya.

Berdasarkan wawancara yang menunjukkan peran aktif Kepala Desa dan stafnya dalam menangani masalah stunting, terdapat keselarasan yang kuat dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022. Upaya desa untuk terlibat langsung dalam penanganan kasus melalui posyandu, termasuk menambah dana untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan lanjut usia, sejalan dengan mandat peraturan yang menempatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program pengurangan stunting. Kesiapan pemerintah desa

dalam menanggapi setiap laporan dan mendorong kader untuk bersikap proaktif juga mencerminkan prinsip tanggap cepat dan sistem monitoring yang diatur dalam Perbup. Selain itu, langkah nyata melakukan sosialisasi kesehatan secara mendalam, terutama mengenai pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, dengan bekerja sama dengan PKK dan kader, sejalan dengan strategi terpadu yang ditekankan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh desa mencerminkan komitmen yang nyata dan juga pelaksanaan yang operasional dari kebijakan daerah yang tertuang dalam Perbup Poso Nomor 22 Tahun 2022, khususnya terkait pemanfaatan dana desa, kolaborasi antar pihak, dan pendekatan edukatif untuk mencegah serta mengurangi angka stunting.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Bapak James Ngkiro umur 54 Tahun selaku penanggung jawab BKKBN Kecamatan Lore Utara

“Menyatakan Untuk memastikan implementasi kebijakan penanganan stunting, Saya sebagai ketua BKKBN mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, membentuk struktur organisasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan kerjasama antar tingkat pemerintahan, mulai dari kecamatan hingga desa. Struktur ini bertujuan memastikan koordinasi terpadu agar program penyelamatan stunting dapat diatasi secara cepat dan efektif. Kedua, BKKBN fokus pada peningkatan kapasitas kader dan petugas lapangan melalui peningkatan kompetensi, khususnya dalam metode edukasi masyarakat. Upaya ini diwujudkan dengan menyelenggarakan *Zoom meeting* berkala yang difasilitasi oleh provinsi, dimana pimpinan memberikan materi pemahaman teknis tentang penanganan stunting di lapangan. Melalui pertemuan ini, kapasitas tim di tingkat kecamatan dan desa ditingkatkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting secara konkret di wilayah Lore Utara”.

Dari hasil wawancara bersama Bapak James selaku penanggung jawab BKKBN, sesuai hasil pengamatan peneliti bahwa langkah-langkah terencana yang dilaksanakan oleh BKKBN di bawah pimpinan Ketua BKKBN dalam menangani

stunting menunjukkan pendekatan yang terorganisir dan kerja sama yang baik. Tindakan strategis yang pertama adalah pendirian struktur organisasi untuk mempercepat penurunan stunting yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan (dari kecamatan hingga desa), menunjukkan keseriusan dalam memperkuat koordinasi dan sinergi program. Struktur ini memberikan kesempatan untuk melakukan intervensi yang lebih sistematis dan responsif dalam mengatasi masalah stunting. Selanjutnya, perhatian diberikan pada peningkatan kemampuan kader dan petugas lapangan melalui pelatihan kompetensi terutama dalam metode edukasi kepada masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan di level komunitas. Inisiatif pertemuan Zoom secara berkala yang dikelola oleh pemerintah provinsi, serta materi teknis yang disampaikan oleh pimpinan BKKBN, mencerminkan usaha untuk memberdayakan sumber daya manusia secara berkesinambungan. Menurut teori George C. Edward III, disposisi merupakan komponen penting yang mencerminkan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Disposisi yang kuat ditunjukkan oleh pemahaman mendalam, keinginan tinggi untuk melaksanakan kebijakan, dan inisiatif nyata di lapangan. Dalam konteks ini, Ketua BKKBN menunjukkan disposisi yang sangat proaktif dan strategis dalam memastikan implementasi kebijakan penurunan stunting berjalan efektif. Langkah konkret yang diambil, seperti pembentukan struktur organisasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan lintas pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga desa, mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya koordinasi sistematis sebagai prasyarat suksesnya implementasi kebijakan. Selain itu, fokus pada peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan

berkala via Zoom yang difasilitasi oleh provinsi menegaskan adanya komitmen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai ujung tombak intervensi. Pemahaman teknis yang diberikan langsung oleh pimpinan menunjukkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan edukatif. Dengan demikian, disposisi Ketua BKKBN tidak hanya tampak dalam retorika, tetapi tercermin dalam tindakan yang berorientasi pada efektivitas kebijakan dan keberhasilan konkret di wilayah Lore Utara.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BKKBN, langkah-langkah strategis yang diambil menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022. Pembentukan organisasi yang melibatkan kolaborasi antar berbagai tingkat pemerintah dari kecamatan hingga desa sesuai dengan prinsip koordinasi yang terintegrasi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Upaya untuk meningkatkan keterampilan kader melalui pelatihan rutin dan pertemuan daring juga menunjukkan komitmen untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan, sesuai dengan penekanan dalam Perbup. Penekanan pada penguatan kemampuan tim di tingkat kecamatan dan desa, terutama di daerah Lore Utara, sejalan dengan fungsi desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program pengurangan stunting. Penyediaan materi teknis lewat metode pembelajaran inovatif seperti pertemuan Zoom juga mendukung pelaksanaan sosialisasi yang aktif mengenai gizi, sesuai dengan strategi yang tercantum dalam peraturan daerah. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh BKKBN tidak hanya memperkuat kebijakan tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Ibu Lita Sore Umur 39 Tahun

Selaku Ketua Kader Stunting

“Menyatakan pemahaman masyarakat tentang stunting yang masih rendah. Kader menggunakan strategi komunikasi dengan *bahasa sederhana* (bahasa pasar) secara bertahap agar mudah dicerna. Keluhan umum masyarakat adalah permintaan kunjungan rumah lebih intensif. Menanggapi hal ini, kader dan perangkat desa menyediakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seperti susu dan telur, yang didistribusikan melalui posyandu atau langsung saat kunjungan rumah”

Dari hasil wawancara bersama Ibu Lita selaku ketua kader stunting, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berada pada tingkat yang cukup rendah, maka dari itu, dibutuhkan cara berkomunikasi yang sesuai dengan konteks lokal. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi mengacu pada sikap, niat, dan kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Disposisi yang kuat tidak hanya mencerminkan komitmen moral, tetapi juga kesiapan adaptif dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dalam hal ini, kader dan perangkat desa menunjukkan disposisi positif dalam merespons rendahnya pemahaman masyarakat tentang stunting. Kader tidak menyerah pada hambatan komunikasi, tetapi justru mengadopsi strategi komunikasi yang lebih akomodatif, seperti penggunaan bahasa pasar dan penyampaian informasi secara bertahap agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Respon terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait permintaan kunjungan rumah, juga memperlihatkan tingkat kepedulian dan tanggung jawab tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai hambatan dalam pemahaman masyarakat tentang stunting, tindakan yang diambil oleh para kader

dan perangkat desa telah sejalan dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dalam edukasi tentang stunting mencerminkan prinsip sosialisasi yang efektif dan inklusif yang diatur dalam peraturan tersebut. Tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat melalui kunjungan rumah secara intensif dan penyaluran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan cerminan dari penerapan sistem pemantauan serta intervensi gizi spesifik yang diatur dalam Perbup. Kerja sama antara kader dan perangkat desa dalam pembagian PMT melalui posyandu maupun kunjungan langsung juga memperkuat peran desa sebagai pihak utama dalam program penanganan stunting. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk menerapkan kerangka kebijakan daerah dalam praktik. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang berbasis pada bahasa lokal serta pendekatan dari rumah ke rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso.

Selain itu ada hasil wawancara bersama Ibu Meralisa Umur 25 Tahun selaku masyarakat Desa Wuasa

“Masyarakat mengakui pernah mendapat penyuluhan gizi dan pencegahan stunting dari pihak kabupaten, terutama melalui Posyandu/Poskesmas. Pesan utama yang diingat adalah pentingnya pola hidup sehat, terutama kebersihan dan perhatian pada ibu hamil. Meskipun fasilitas Posyandu seperti timbangan bayi, KMS, dan PMT tersedia (walau kadang tidak rutin), serta pernah ada bantuan vitamin/zat besi dan beras fortifikasi dari berbagai pihak (termasuk kepolisian), kendala terbesar bukanlah biaya, jarak, atau ketersediaan pangan, melainkan rendahnya kemauan dan kesadaran masyarakat. Banyak warga masih memandang enteng kegiatan Posyandu, merasa tidak perlu datang lagi setelah anak selesai imunisasi dasar, padahal pemantauan gizi dan tumbuh kembang harus berkelanjutan”.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Meralisa selaku masyarakat Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa masyarakat telah mendapatkan berbagai langkah penanganan stunting melalui inisiatif pendidikan gizi dan layanan Posyandu yang didukung oleh pemerintah Desa. Dalam teori George C. Edward III, disposisi tidak hanya merujuk pada sikap pelaksana kebijakan, tetapi juga mencakup sikap dan penerimaan dari masyarakat sebagai subjek implementasi. Disposisi masyarakat yang lemah dapat menjadi penghambat besar dalam pencapaian tujuan kebijakan, bahkan ketika sumber daya dan struktur pendukung telah tersedia. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat di desa telah memperoleh penyuluhan gizi dan pencegahan stunting melalui posyandu dan puskesmas, serta tersedia fasilitas dasar seperti timbangan bayi, KMS, PMT, vitamin, dan bantuan pangan dari berbagai pihak, partisipasi masyarakat tetap rendah. Kendala utama bukan terletak pada aspek biaya, akses, atau infrastruktur, melainkan rendahnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk terlibat secara berkelanjutan dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Banyak warga yang menganggap posyandu hanya penting hingga anak menyelesaikan imunisasi dasar, padahal pemantauan gizi dan perkembangan anak harus dilakukan terus-menerus.

Berdasarkan wawancara, pelaksanaan program pengurangan stunting di Kabupaten Poso menunjukkan kesesuaian dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022, meskipun masih ada tantangan signifikan terkait kesadaran publik. Kegiatan penyuluhan gizi yang telah dilaksanakan melalui Posyandu/Poskesmas selaras dengan tuntutan undang-undang mengenai pendidikan dan sosialisasi sebagai strategi yang menyeluruh. Keberadaan fasilitas pemantauan gizi seperti

timbangan bayi, KMS, dan PMT serta dukungan dari berbagai pihak menunjukkan pelaksanaan dukungan sarana dan intervensi gizi yang diatur dalam Perbup. Namun, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan berkelanjutan setelah imunisasi dasar menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan pendekatan komunikasi yang lebih efektif, sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam peraturan tersebut. Kerja sama antar berbagai pihak yang terlihat dari dukungan beberapa instansi juga sesuai dengan semangat kolaborasi yang ditekankan dalam Perbup. Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai target penurunan stunting yang ditetapkan dalam peraturan ini.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa melibatkan struktur birokrasi yang berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, dengan peran dan tanggung jawab yang saling terkait. Di tingkat desa, Pemerintah Desa Wuasa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berfungsi sebagai pelaksana utama dan koordinator lapangan. Mereka membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa yang biasanya melibatkan Ketua RT/RW, kader posyandu, bidan desa, dan perwakilan tokoh masyarakat/agama. Tim inilah yang bertugas langsung melakukan pendataan sasaran (ibu hamil, bayi, balita), memantau pertumbuhan anak di posyandu, memberikan penyuluhan kepada keluarga, mendistribusikan bantuan pangan (jika ada), serta melaporkan perkembangan dan kendala ke tingkat di atasnya. Keterlibatan aktif kader kesehatan sebagai ujung tombak pendampingan keluarga sangat krusial dalam struktur ini.

Pada tingkat kecamatan, Pemerintah Kecamatan Lore Utara (dipimpin

Camat) bertindak sebagai pengawas, fasilitator, dan koordinator antar-desa. Camat memimpin TPPS Kecamatan yang melibatkan instansi vertikal di kecamatan, terutama Puskesmas Lore Utara. Puskesmas memegang peran teknis vital, menyediakan tenaga kesehatan (bidan, perawat, ahli gizi) untuk pendampingan intensif, pelatihan kader desa, pelayanan kesehatan dasar (imunisasi, pemeriksaan kehamilan), diagnosis dini stunting, dan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan lebih tinggi. Puskesmas juga bertanggung jawab atas analisis data stunting dari desa-desa dan menyusun rencana intervensi spesifik berbasis data tersebut, serta menyampaikan laporan dan kebutuhan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

Sementara itu, di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Kesehatan merupakan leading sector yang bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, pembinaan teknis, pemantauan evaluasi, dan koordinasi lintas sektor secara menyeluruh. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Poso (TPPS Kabupaten), yang dipimpin Bupati atau Wakil Bupati dan melibatkan kepala dinas terkait (Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pekerjaan Umum, Pendidikan, Sosial, Pertanian, dll) serta Bappeda, bertugas menyusun kebijakan strategis, mengalokasikan anggaran (baik APBD maupun dana desa yang diarahkan untuk stunting), memastikan sinergi program (seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pangan bergizi, pendidikan kesehatan), melakukan supervisi ke kecamatan dan desa, serta melaporkan capaian ke provinsi dan pusat. Bappeda Kabupaten Poso memegang peran penting dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran lintas dinas untuk mendukung program penanganan stunting secara terpadu di seluruh desa, termasuk Wuasa.

“Wawancara Menurut Ibu Helvi Wati Gae umur 54 Tahun selaku Kepala Puskesmas Wuasa”

“Menyatakan bahwa saya sebagai kepala puskesmas Penanggung jawab utama, yang kemudian berkoordinasi dengan petugas gizi (fokus pada intervensi gizi dan pendampingan keluarga), bidan desa (pemantauan ibu hamil hingga pascamelahirkan), petugas program remaja (edukasi calon ibu remaja), dokter (konsultasi medis kasus kompleks), serta kader stunting khusus sebagai ujung tombak pemantauan lapangan melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP) di mana perawat dan kader di puskesmas pembantu (puskesmas pembantu) secara intensif menangani setiap balita stunting”

Dari hasil wawancara bersama ibu helvi selaku kepala puskesmas wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa adanya sistem penanganan stunting yang terencana dan menyeluruh melalui kerja sama. Puskesmas sebagai sektor utama telah menciptakan model intervensi terintegrasi yang melibatkan beragam tenaga kesehatan dengan spesialisasi dan peran yang saling melengkapi. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab utama tidak hanya bertindak sebagai koordinator, tetapi juga sebagai penggerak semua elemen program. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi dalam konteks ini, kepala Puskesmas menunjukkan peran sentral sebagai penanggung jawab utama kebijakan penanganan stunting, dengan membentuk struktur koordinatif yang melibatkan berbagai unsur fungsional: petugas gizi fokus pada intervensi nutrisi dan pendampingan keluarga; bidan desa memantau ibu hamil hingga pascamelahirkan; petugas remaja memberikan edukasi kepada calon ibu dari kelompok usia muda; dan dokter menangani kasus medis kompleks. Selain itu, terdapat penunjukan kader stunting khusus sebagai ujung tombak pemantauan lapangan, yang diperkuat melalui penerapan Program Integrasi Layanan Primer (ILP). Dalam skema ILP, perawat dan kader di puskesmas pembantu (puskesmas pembantu)

bertanggung jawab menangani setiap kasus balita stunting secara intensif dan berkelanjutan. Struktur birokrasi ini memperlihatkan keterpaduan lintas fungsi dan lintas jenjang pelayanan kesehatan, sehingga setiap elemen memiliki peran jelas dalam sistem.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting yang Terintegrasi di Desa, Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan berbagai sektor dengan tujuan menggabungkan berbagai elemen layanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Puskesmas berperan untuk memastikan adanya kerjasama yang baik dengan petugas gizi dalam hal intervensi dan pendampingan kepada keluarga, bidan desa yang melakukan pemantauan terhadap ibu hamil hingga setelah melahirkan, petugas program remaja yang memberikan edukasi kepada calon ibu remaja, dokter yang menangani kasus-kasus medis yang rumit, serta kader stunting yang bertugas sebagai pengawas di lapangan. Program Integrasi Layanan Primer (ILP) diadopsi sebagai kerangka kerja yang melibatkan perawat dan kader di puskesmas pembantu (pustu) untuk penanganan intensif terhadap setiap balita yang mengalami stunting. Dengan menerapkan pendekatan terkoordinasi ini, penurunan stunting di tingkat desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain itu ada hasil wawancara Menurut Bapak Budi Utomo Mondolu umur 42 Tahun, Selaku Kepala Desa Wuasa

“Menyatakan saya sebagai Kepala Desa selaku pembina utama. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa melakukan kolaborasi struktural dengan Ketua TP PKK Desa beserta para kader kesehatan yang tersebar di wilayah desa. Koordinasi dan evaluasi rutin dilakukan melalui kerja sama dengan

Puskesmas setempat, dengan pertemuan pemantauan dilaksanakan setiap triwulan sekali untuk membahas perkembangan kasus stunting, kehamilan, dan persalinan. Meskipun belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur program penanganan stunting, Pemerintah Desa mengandalkan sikap responsif dan komitmen seluruh perangkat desa dalam menangani setiap temuan kasus stunting yang muncul di masyarakat”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Budi selaku Kepala Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa adanya pendekatan kolaboratif dalam menangani stunting yang langsung dipimpin oleh pemerintahan desa. Kepala Desa berperan sebagai pengarah utama dengan membangun kolaborasi struktural yang melibatkan TP PKK Desa dan jaringan kader kesehatan yang berfungsi sebagai garda terdepan di masyarakat, serta Puskesmas sebagai partner teknis. Dalam teori George C. Edward III, struktur birokrasi Kepala Desa menjalankan fungsi sebagai pembina utama dalam penanganan stunting, dengan membangun struktur kolaboratif bersama Ketua TP PKK dan para kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah desa. Pemerintah Desa juga menjalin hubungan koordinatif yang kuat dengan Puskesmas setempat, tercermin dalam pelaksanaan pertemuan rutin triwulanan untuk mengevaluasi perkembangan kasus stunting, kehamilan, dan persalinan. Meskipun belum memiliki landasan hukum formal berupa Peraturan Desa (Perdes) khusus, sistem birokrasi yang terbentuk menunjukkan adanya alur kerja yang responsif dan terkoordinasi. Komitmen dan kesiapan seluruh perangkat desa untuk merespons setiap temuan kasus secara cepat menggantikan fungsi formal regulasi dalam mendukung kelancaran implementasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Penanganan Percepatan Pencegahan dan Pengurangan Stunting Terpadu di Desa, Kepala Desa memegang peran penting sebagai pengarah utama yang melibatkan

semua pihak terkait di tingkat desa. Dalam praktiknya, Kepala Desa memimpin kerjasama yang terstruktur dengan Ketua TP PKK Desa dan kader kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan mendampingi keluarga yang berpotensi mengalami stunting. Dengan bekerja sama dengan Puskesmas setempat, diadakan pertemuan pemantauan setiap triwulan untuk mendiskusikan perkembangan terkait stunting, kehamilan, dan persalinan. Meskipun belum ada Peraturan Desa yang khusus, Pemerintah Desa tetap berusaha maksimal untuk merespons dan mempertahankan komitmen semua perangkat desa dalam menangani setiap kasus stunting yang ditemukan, sesuai dengan prinsip integrasi layanan yang diatur dalam peraturan ini.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Bapak James Ngkiro umur 54 Tahun selaku penanggung jawab BKKBN Kecamatan Lore Utara

“Struktur birokrasi penanganan stunting mengikuti hierarki yang jelas dari tingkat provinsi hingga desa. Program percepatan penurunan stunting diimplementasikan melalui koordinasi berjenjang: kebijakan dari pemerintah pusat (Perpres No. 72/2021 dan turunannya) ditransmisikan ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Di tingkat lapangan, dibentuk struktur organisasi khusus di kecamatan dan desa yang melibatkan sinergi multipihak, termasuk BKKBN, Puskesmas, pemerintah desa, kader stunting, dan OPD terkait. Struktur ini bertugas mengoordinasikan program secara terpadu, memastikan kebijakan nasional terlaksana di tingkat lokal. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan bersama Puskesmas untuk menilai progres penanganan stunting, memastikan akuntabilitas dan keselarasan dengan target nasional.

Dari hasil wawancara bersama Bapak James selaku penanggung jawab BKKBN di Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa sistem birokrasi untuk mengatasi stunting di Indonesia telah dirancang dengan cara yang terstruktur dan berjenjang, mengikuti alur kebijakan dari tingkat nasional ke daerah.

Dalam teori George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena mencakup mekanisme koordinasi, jenjang organisasi, dan alur komando yang memungkinkan kebijakan berjalan sistematis dari pusat hingga tingkat lokal. Penanganan stunting di Indonesia secara eksplisit mencerminkan prinsip ini melalui struktur hierarkis yang dimulai dari kebijakan nasional, seperti Perpres No. 72 Tahun 2021, yang kemudian diturunkan secara berjenjang ke provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Implementasi di lapangan diperkuat dengan pembentukan struktur organisasi percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan dan desa, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara BKKBN, Puskesmas, pemerintah desa, kader stunting, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Pengurangan Stunting dan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022, pendekatan untuk menangani stunting di Kabupaten Poso menggunakan sistem hierarki terintegrasi dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. Kebijakan nasional disampaikan melalui tingkat kabupaten, di mana dibentuk Tim Percepatan Pengurangan Stunting yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah terkait, kemudian diimplementasikan di tingkat kecamatan dan desa dengan kerjasama berbagai pihak, termasuk BKKBN, Puskesmas, pemerintah desa, kader stunting, dan OPD yang relevan. Program ini meliputi intervensi yang spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi, serta intervensi yang sensitif terkait perbaikan sanitasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan melalui laporan yang disampaikan oleh kader

ke Puskesmas serta rapat koordinasi rutin untuk memastikan akuntabilitas serta kesesuaian dengan sasaran nasional pengurangan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Kerjasama semua pemangku kepentingan ini merupakan faktor utama keberhasilan dalam percepatan pengurangan stunting secara terintegrasi di tingkat lokal.

Selain itu ada hasil wawancara menurut Ibu Lita Sore Umur 39 Tahun Selaku Ketua Kader Stunting

“Komunikasi efektif dengan bahasa sederhana, pendampingan tenaga kesehatan, dan distribusi PMT menjadi strategi utama kader. Namun, tantangan signifikan meliputi penolakan orang tua, kebutuhan peningkatan kapasitas kader (terutama pemahaman dasar stunting), belum adanya struktur/organisasi dan program desa yang jelas khusus stunting, serta keterbatasan anggaran dari kabupaten. Penyebab stunting lokal dipicu oleh masalah gizi ibu hamil dan kehamilan remaja”.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Lita selaku Ketua Kader Stunting di Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pendekatan untuk menangani stunting di lapangan berfokus pada tiga metode utama, yakni komunikasi yang jelas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar masyarakat bisa memahami, pendampingan yang intensif oleh tenaga medis, dan penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai bentuk intervensi gizi langsung. Namun, pelaksanaan strategi ini menghadapi beberapa tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Di tingkat masyarakat, ditemukan masih ada penolakan dari orang tua yang tidak kooperatif, sedangkan di tingkat kader terdapat keterbatasan kemampuan terutama dalam memahami gagasan tentang stunting. Di tingkat organisasi, belum ada struktur yang jelas dan program desa yang spesifik untuk menangani stunting, ditambah lagi dengan anggaran yang terbatas dari pemerintah kabupaten, semua ini berpengaruh terhadap efektivitas program. Menurut teori

implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi. Dalam konteks ini, kader posyandu telah berupaya menjalankan strategi komunikasi efektif menggunakan bahasa sederhana, memberikan pendampingan dengan dukungan tenaga kesehatan, serta menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai bentuk intervensi. Namun, efektivitas strategi tersebut dibatasi oleh berbagai hambatan struktural, termasuk belum adanya organisasi dan program desa yang secara khusus menangani stunting, serta ketergantungan pada anggaran kabupaten yang sering kali terbatas. Ketidakjelasan struktur birokrasi membuat kader bekerja dalam situasi yang reaktif, bukan sistematis, sehingga penanganan kasus stunting yang dipicu oleh gizi buruk pada ibu hamil dan kehamilan remaja berjalan tanpa koordinasi strategis jangka panjang. Kebutuhan peningkatan kapasitas kader juga menjadi indikasi lemahnya dukungan sistemik dalam bentuk pelatihan atau supervisi berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam kerangka Edward III, tantangan ini mencerminkan perlunya pembentukan struktur birokrasi formal di tingkat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 mengenai percepatan penurunan stunting, upaya yang dilakukan oleh kader untuk menangani stunting mencakup komunikasi yang efektif dengan bahasa yang mudah dipahami, pendampingan dari tenaga kesehatan, dan penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai intervensi utama. Namun, saat pelaksanaannya, kader menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, seperti penolakan dari orang tua, perlunya peningkatan kapasitas terutama dalam memahami konsep dasar tentang stunting, belum adanya struktur organisasi dan program desa yang jelas berfokus

pada penanganan stunting, serta keterbatasan anggaran dari tingkat kabupaten. Masalah stunting di tingkat lokal lebih dipicu oleh isu gizi pada ibu hamil dan tingginya angka kehamilan di kalangan remaja. Meskipun Peraturan Bupati tersebut telah menetapkan penguatan kapasitas kader, pembentukan lembaga di tingkat desa, dan penyediaan anggaran yang cukup, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah desa, puskesmas, dan OPD terkait untuk mengatasi berbagai masalah operasional tersebut.

Selain itu ada hasil wawancara bersama Ibu Meralisa umur 25 Tahun selaku masyarakat Desa Wuasa

“menyatakan Masyarakat menerima penyuluhan tentang gizi anak dan pencegahan stunting dari pemerintah kabupaten. Pesan kunci yang disampaikan adalah pentingnya pola hidup sehat, terutama kebersihan dan perhatian pada ibu hamil. Sarana pendukung seperti timbangan bayi, KMS (Kartu Menuju Sehat), dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) tersedia di Posyandu/Poskesmas, meskipun distribusi PMT tidak rutin akibat kendala pendanaan (*"kalau dana belum cair, macet sebentar"*). Bantuan lain seperti vitamin, tablet besi, dan beras fortifikasi juga pernah diberikan, salah satunya melalui kolaborasi dengan kepolisian. Desa memiliki program khusus untuk anak kurang gizi dan tercipta koordinasi baik antara kader Posyandu dengan perangkat desa. Namun, kendala utama terletak pada faktor non-struktural, yaitu kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat (*"masih memandang enteng Posyandu setelah imunisasi selesai"*). Di sisi lain, aspek infrastruktur seperti sanitasi dan air bersih telah terpenuhi 100% berkat bantuan desa.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Meralisa selaku masyarakat Desa Wuasa, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa usaha untuk mencegah stunting di masyarakat telah dilakukan melalui berbagai tindakan. Pemerintah daerah secara aktif memberikan edukasi tentang gizi anak dengan menekankan signifikansi gaya hidup sehat, kebersihan, dan perhatian khusus kepada ibu yang sedang hamil. Di tingkat desa, telah ada program khusus bagi anak yang mengalami kekurangan gizi

serta kerjasama yang baik antara kader Posyandu dan perangkat desa. Meski demikian, peneliti menemukan bahwa tantangan utama bersifat non-teknis, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat yang cenderung meremehkan pentingnya pemantauan rutin di Posyandu setelah masa imunisasi dasar berakhir. Ternyata setelah imunisasi pertama dilakukan masih harus dilakukan pemantauan untuk imunisasi selanjutnya ketakutan para ibu yaitu di lengkapnya imunisasi yang mengakibatkan anak akan cenderung sering sakit. Dalam teori George C. Edward III, struktur birokrasi dalam konteks penanganan stunting di desa, tampak adanya struktur fungsional yang cukup berjalan, dengan tersedianya sarana pendukung seperti timbangan bayi, Kartu Menuju Sehat (KMS), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu dan Poskesmas. Masyarakat juga menerima penyuluhan dari pemerintah kabupaten, yang menunjukkan adanya jalur komunikasi kebijakan dari tingkat atas ke bawah. Bantuan tambahan seperti vitamin, tablet zat besi, dan beras fortifikasi, termasuk dari kolaborasi eksternal seperti kepolisian, mencerminkan kerja lintas sektor yang mendukung fungsi birokrasi secara horizontal. Di tingkat desa, koordinasi antara kader Posyandu dan perangkat desa berjalan cukup baik, dan telah dibentuk program khusus untuk anak dengan status gizi kurang. Namun demikian, terdapat kelemahan birokratis pada sisi pendanaan, yang berdampak pada tidak konsistennya distribusi PMT karena keterlambatan pencairan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 mengenai upaya pengurangan stunting, masyarakat telah mendapatkan berbagai program pencegahan stunting melalui penyuluhan tentang gizi anak dan pola hidup sehat

yang menekankan pada kebersihan dan perhatian khusus untuk ibu hamil. Fasilitas pendukung seperti timbangan bayi, KMS, dan PMT tersedia di Posyandu dan Poskesmas, meskipun penyebaran PMT mengalami ketidakrataan karena masalah pendanaan. Bantuan lain seperti vitamin, tablet besi, dan beras fortifikasi juga telah diberikan melalui kerjasama antara berbagai pihak termasuk kepolisian. Desa-desa telah merancang program khusus untuk anak-anak yang kurang gizi dan membangun koordinasi yang baik antara kader Posyandu dengan pemerintah desa. Masalah utama justru terkait aspek non-struktural, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih menganggap remeh peran Posyandu setelah program imunisasi berakhir. Di sisi lain, infrastruktur seperti sanitasi dan pasokan air bersih telah terpenuhi 100% berkat dukungan dari pemerintah desa, sesuai dengan instruksi Perbup Poso untuk menciptakan lingkungan yang sehat sebagai bagian dari strategi pengurangan stunting secara menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Desa Wuasa menunjukkan kemajuan yang baik, terlihat dari berkurangnya angka stunting, meskipun masih ada beberapa hambatan yang signifikan. Dalam hal komunikasi, cara penyampaian informasi kurang efisien karena penggunaan bahasa yang terlalu rumit dalam materi edukasi, sehingga warga lebih responsif terhadap informasi yang disampaikan langsung dengan bahasa yang sederhana melalui pendekatan budaya lokal. Dari sudut pandang sumber daya, anggaran yang tersedia belum cukup untuk program pemberian makanan tambahan, pelatihan kader, dan pendidikan kesehatan, serta keterlambatan dalam pencairan dana mengganggu distribusi makanan tambahan secara teratur. Di sisi disposisi, komitmen para pelaksana kebijakan sangat kuat, terbukti dari alokasi anggaran dan program inovatif, tetapi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan gizi terus-menerus masih rendah. Pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antara berbagai level pemerintahan belum berjalan dengan baik dan belum ada Peraturan Desa yang khusus, meskipun sudah ada upaya perbaikan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Secara keseluruhan, pencapaian ini masih perlu meningkatkan komunikasi berdasarkan budaya lokal, penguatan anggaran, dan koordinasi di dalam birokrasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

6.2 Saran

1. Tingkatkan Komunikasi Berbasis Budaya Lokal dengan mengganti materi teknis menjadi media visual berbasis simbol lokal (gambar, komik), memanfaatkan saluran tradisional (rapat dusun, pengajian), serta mengintensifkan penggunaan "Bahasa Pasar", kunjungan rumah, dan melibatkan tokoh adat/agama sebagai duta pesan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi stigma.
2. Pendanaan Desa dengan segera membentuk Peraturan Desa (Perdes) khusus stunting untuk melegitimasi TPPS, memastikan alokasi dan pencairan dana desa yang memadai serta tepat waktu untuk kebutuhan pokok (PMT, pelatihan, alat, insentif kader), serta memanfaatkan hasil monitoring bulanan untuk evaluasi cepat dan replikasi adaptif inovasi sukses di seluruh wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amud, Milwan. n.d. "Stunting Reduction in Indonesia: Challenges and Opportunities."
https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A7%3A15919975/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A170377855&crl=c&link_origin=scholar.google.com.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)," 6.
- Azahra, Shafira, Hana Hana, and Ninuk Arifiyani. 2023. "Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Stunting." *JRP : Jurnal Relasi Publik* 1 (1): 5.
- Boucot, Arthur J., and George O. Poinar Jr. 2020. "Stunting." *Fossil Behavior Compendium*, 271–72. <https://doi.org/10.1201/9781439810590-39>.
- Endy Paryanto Prawirohartono, dan Rofi Nur Hanifah P. 2019. "Kenali Penyebab Stunting Anak." 22-7-2019. 2019. <https://sardjito.co.id/>.
- H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- H.R. Rasuna Said. 2016. "Stunting." 2016. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/defisiensi-nutrisi/stunting>.
- Haria, Dartianis, Kalpin Sembiring, Juander Sebayang, and Besti Rohana Simbolon. 2023. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo." *Governance Opinion* 8 (1): 10–18.
- James.Anderson.2015.*PublicPolicymaking*.
https://www.google.co.id/books/edition/Public_Policymaking/B0QKzgEACAAJ?hl=id.
- Kemenkes RI. 2021. *Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting (Buku 1). Kementerian Kesehatan RI. Vol. 11.*
- Kismartini. 2019. "Pengertian Kebijakan Pemerintahan -." *Article* 2019:1–88. <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>.
- Kuncoro, mochammad rizal alim. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA." 19-

- 6-2023. 2023.
https://tegalkab.go.id/news/view/artikel/analisis_kebijakan_penanggulangan_penurunan_stunting_di_indonesia_20230619163716.
- MULYONO. 2009. "No Title." *MODEL IMPLEMETASI KEBIJAKAN EDWARD III*. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.
- Putri, Risyia Ananda, Sri Sulastri, and Nurliana Cipta Apsari. 2023. "Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Upaya Pencegahan Stunting." *Ijd-Demos* 5 (1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i1.394>.
- Rachman, Tahar. 2018. "Hubungan Berat Badan Bayi Lahir Dengan Penyakit Pada Saat Kehamilan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rizki, Adinda. n.d. "Pengertian Stunting: Penyebab, Gejala, Dampak, Dan Cara Mencegahnya." 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/lordosis/>.
- Romadon, Wahyu. 2024. "Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa." *Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa*. <https://prapagkidul-pituruh.purworejokab.go.id/index.php/artikel/2024/1/3/pemerintah-desadan-pemerintahan-desad>.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. 2021. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (1): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- S, Hofrenning DChambers. 2025. *Public Policymaking*. https://www.mendeley.com/catalogue/9f81bbb7-f593-34b0-8140-e663945f2c95/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B6ba9ec48-330b-4b38-b0c3-59977c745f66%7D.
- Sazali, Hasan. 2023. *Komunikasi Kebijakan Penanganan Stunting Berbasis Agama Dan Budaya Di Indonesia*. https://books.google.co.id/books/about/Komunikasi_Kebijakan_Publik.html?hl=id&id=H5jCEAAQBAJ&redir_esc=y.
- Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana Pipit Mulyah Dyah Aminatun Sukma Septian Nasution Tommy Hastomo. 2021. "No Title 濟無No Title No Title No Title." *Journal GEEJ* 7 (2).
- Sitti Chaeriah Ahsan, La Samudia Dalili, Daswati. 2024. "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di KabupatenDonggala." <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4123/2443>.

Teniwut, Meilani. 2022. “Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian.”
https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian#google_vignette.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. “Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia” 11 (1): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

“PEDOMAN WAWANCARA”

Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa Komunikasi

- 1) Bagaimana cara Pemerintah Desa Wuasa menyampaikan kebijakan penanganan stunting kepada warga desa?
- 2) Apa saja media komunikasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Wuasa untuk menyampaikan kebijakan penanganan stunting kepada warga?
- 3) Apakah tersedia wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun saran mengenai masalah stunting?
- 4) Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Wuasa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanganan stunting?
- 5) Profil Desa Wuasa

Sumber Daya

- 1) Berapa besar anggaran APBDes yang disediakan untuk menangani stunting pada tahun ini?
- 2) Apakah dana yang ada mencukupi untuk kegiatan intervensi gizi, pelatihan kader, atau edukasi kesehatan?
- 3) Bagaimana ketersediaan dan distribusi makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di posyandu?
- 4) Apa saja masalah yang muncul dalam pengeluaran anggaran?

- 5) Apakah ada bantuan dana dari pemerintah kabupaten, provinsi, atau lembaga non-pemerintah untuk mendukung program air bersih dan sanitasi?

Disposisi (Sikap dan Komitmen Aparat)

- 1) Bagaimana sikap dan respons kepala desa, kader posyandu, dan pihak terkait terhadap laporan atau temuan kasus stunting?
- 2) Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Wuasa untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan stunting diimplementasikan dengan baik?
- 3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wuasa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dan kader posyandu dalam menangani stunting?

Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana struktur organisasi penanganan stunting di Desa Wuasa? Siapa penanggung jawab, tim pelaksana, dan mitra kerjanya?
- 2) Apakah ada peraturan desa (Perdes) atau kebijakan khusus yang mengatur program penanganan stunting?
- 3) Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dengan dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas dalam implementasi program?
- 4) Apakah ada evaluasi rutin terhadap kinerja program penanganan stunting di tingkat desa?

Pertanyaan Untuk Puskesmas Komunikasi

- 1) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting?
- 2) Bagaimana cara kerja sama antara Puskesmas dengan pemerintahan desa dalam penanganan stunting?
- 3) Apakah ada forum rutin (seperti rapat koordinasi) untuk membahas perkembangan kasus stunting di Desa Wuasa?
- 4) Bagaimana Puskesmas menampung keluhan atau masukan dari masyarakat terkait program stunting?

Sumber Daya

- 1) Berapa banyak tenaga kesehatan (bidan, ahli gizi, dokter) yang ditugaskan khusus untuk penanganan stunting di Desa Wuasa?
- 2) Berapa alokasi dana dari Puskesmas untuk intervensi stunting (misalnya PMT, penyuluhan, atau pelatihan kader)?
- 3) Bagaimana sistem pemantauan data balita stunting di Desa Wuasa (apakah terintegrasi dengan aplikasi/Sistem Informasi Gizi)?

Disposisi

- 1) Seberapa besar prioritas penanganan stunting bagi Puskesmas Lore Utara?
- 2) Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Puskesmas untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan stunting diimplementasikan dengan baik?

- 3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam menangani stunting?

Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana struktur organisasi Puskesmas dalam menangani stunting?
- 2) Apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur organisasi penanganan stunting di Puskesmas?
- 3) Apakah ada Peraturan Bupati atau Surat Edaran Dinas Kesehatan yang menjadi acuan program stunting di Puskesmas?
- 4) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa Wuasa dan instansi lain dalam menangani stunting?

Pertanyaan untuk BKKBN Komunikasi

- 1) Bagaimana BKKBN berkoordinasi dengan pemerintah desa, Puskesmas, dan kader KB dalam menyampaikan program pencegahan stunting di Desa Wuasa?
- 2) Bagaimana BKKBN mengedukasi pasangan usia subur (PUS) tentang pentingnya jarak kelahiran dan gizi dalam pencegahan stunting?

Sumber Daya

- 1) Bagaimana alokasi dana BKKBN untuk program yang berkaitan dengan stunting misalnya program Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak?

- 2) Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh BKKBN untuk menangani stunting, seperti anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas?

Disposisi

- 1) Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh BKKBN untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan stunting diimplementasikan dengan baik?
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas lapangan dalam menangani stunting?

Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana struktur organisasi BKKBN dalam menangani stunting?
- 2) Seberapa sering monitoring dan evaluasi program dilakukan bersama dengan pihak Puskesmas atau desa?
- 3) Bagaimana program BKKBN selaras dengan Perpres No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting?

Pertanyaan Untuk Kader Posyandu Komunikasi

- 1) Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam mengkomunikasikan kebijakan penanganan stunting kepada masyarakat?
- 2) Keluhan apa yang sering disampaikan oleh masyarakat tentang program stunting dan bagaimana cara kader untuk menanggapi pertanyaan tersebut?
- 3) Seberapa sering berkoordinasi dengan bidan desa/Puskesmas tentang kasus stunting?

Sumber Daya

- 1) Apa saja sumber daya yang Anda miliki untuk menangani stunting, seperti pelatihan, peralatan, dan fasilitas?
- 2) Kapan terakhir kali mendapat pelatihan tentang pemantauan stunting?
- 3) Materi apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan sebagai kader?
- 4) Apakah ada kendala dalam distribusi vitamin A/tablet zat besi dan PMT?

Disposisi

- 1) Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani stunting?
- 2) Bagaimana menangani orang tua yang tidak mau mengakui anaknya stunting?
- 3) Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting?

Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana struktur organisasi Posyandu dalam menangani stunting?
- 2) Bagaimana dukungan anggaran desa untuk kegiatan Posyandu?
- 3) Apakah ada Perdes atau program khusus stunting yang melibatkan kader?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama stunting di Desa Wuasa?

Pertanyaan Untuk Masyarakat

Komunikasi

- 1) Apakah Bapak/Ibu pernah dapat penyuluhan tentang gizi anak atau pencegahan stunting? Dari siapa dan bagaimana caranya
- 2) Pesan apa saja yang paling diingat dari penyuluhan Posyandu/Puskesmas tentang cara mencegah anak kerdil (stunting)?
- 3) Jika ada keluhan tentang kesehatan anak, kemana biasanya Bapak/Ibu melapor? Apakah dapat respon cepat?

Sumber Daya

- 1) Apakah di Posyandu tersedia timbangan bayi/KMS dan makanan tambahan (PMT) secara rutin?
- 2) Pernah dapat bantuan seperti vitamin, tablet zat besi, atau beras fortifikasi? Bagaimana cara mendapatkannya?
- 3) Apa kendala terbesar dalam memenuhi gizi anak biaya, jarak ke Posyandu, atau kurangnya bahan pangan bergizi?
- 4) Bagaimana ketersediaan sanitasi dan air bersih?

Disposisi

- 1) Seberapa sering mengikuti kegiatan Posyandu? Apa alasan jika tidak hadir?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting mencegah stunting? Apa yang sudah dilakukan di keluarga?

- 3) Apa yang membuat warga sulit mengubah kebiasaan pola makan anak?"
(Misal: tradisi, ekonomi, atau kurang pengetahuan)

Struktur Birokrasi

- 1) Apakah ada program khusus dari desa untuk anak kurang gizi? (Misal: bagi-bagi makanan bergizi, penyuluhan khusus)
- 2) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang kinerja kader Posyandu dan bidan desa dalam menangani masalah gizi?
- 3) Pernah dapat kunjungan rumah dari petugas untuk memantau kesehatan anak? Bagaimana pengalamannya?
- 4) Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan program penanganan stunting di desa kita?
- 5) Jika ada anak yang terlihat kurus/kerdil, biasanya warga sekitar bersikap bagaimana?

Lampiran 3 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Mahasiswa

Nama	: Devi Noflisa Nggasi
Tempat, Tanggal Lahir	: Palu, 26-November -2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen Protestan
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Lagarutu

B. Identitas Orang Tua

a. Ayah :	
a. Nama	: Yanbertus Nggasi (Alm)
b. Pekerjaan	: Petani
c. Pendidikan	: Tamat SMA/Sederajat
d. Alamat	: Desa Wuasa
b. Ibu :	
1. Nama	: Mapsus Mariati Gurinda
2. Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)
3. Pendidikan	: Tamat SMA/Sederajat
4. Alamat	: Desa Wuasa

C. Pendidikan

1. Telah Lulus SDN Wuasa 2014-2015
2. Telah Lulus SMP Negeri 3 Poso Pesisir 2017-2018
3. Telah Lulus SMKS Swadaya 1 Palu 2020-2021
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa Di Program Studi Ilmu Pemerintahan

Lampiran 4 : Surat Izin Meneliti



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Soekarno Hatta, Kilometr. 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untadfisip18@gmail.com_Laman : <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : ~~1700~~/UN28.3/DT.00.00/2025
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Palu, 21 Mei 2025

**Kepada Yth.
Kepala Desa Wuasa Kabupaten Poso**

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Devi Noflisa Nggasi**
Stambuk : **B 401 21 259**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan/Prodi : **Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan**
Judul Proposal : **Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso**

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari kantor/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

/ **Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si.**
NIP 196810211992031001

Tembusan Yth :
1. Dekan Fisip Univ. Tadulako (Sebagai Laporan);
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Univ. Tadulako;
3. Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Tadulako;
4. Arsip.

Lampiran 5 : Surat Keterangan Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
KECAMATAN LORE UTARA
DESA WUASA**

Alamat Jln. Malino No.01 Wuasa

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140/067/VI/wuasa/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA	: BUDI UTOMO MONDOLU
JABATAN	: KEPALA DESA
ALAMAT	: DESA WUASA

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

NAMA	: DEVI NOFLISA NGGASI
STAMBUK	: B 401 21 259
FAKULTAS	: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN/PRODI	: ILMU ADMINISTRASI/ILMU PEMERINTAHAN

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso pada tanggal 3-5 juni 2025, Untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir yang berjudul "**KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI DESA WUASA KECAMATAN LORE UTARA KABUPATEN POSO**".

Demikian surat keterangan ini di buat yang sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wuasa, 09 Juni 2025
Kepala Desa Wuasa



BUDI UTOMO MONDOLU, S.Pd., M.Si.

Lampiran 6 : Daftar identitas Informan

1. Nama : Budi Utomo Mondolu S.Pd., M.Si
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 42 Tahun
 Jabatan : Kepala Desa

2. Nama : Helvi Wati Gae S.K.M
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 54 Tahun
 Jabatan : Kepala Puskesmas Wuasa

3. Nama : James Ngkiro S.o.s
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Umur : 54 Tahun
 Jabatan : Penanggung Jawab BKKBN Kecamatan Lore Utara

4. Nama : Lita Sore
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 39 Tahun
 Jabatan : Ketua Kader Stunting

5. Nama : Septivio Meralisa Abu
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 25 Tahun
 Jabatan : Masyarakat

Lampiran 7 :

DOKUMENTASI



Gambar 1. Bersama Bapak James Ngkiro



Gambar 2. Bersama Kepala Desa Wuasa



Gambar 3. Bersama Kepala Puskesmas Wuasa



Gambar 4. Wawancara Bersama Kepala Desa Wuasa



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua Kader Stunting



Gambar 6. Bersama Masyarakat Desa Wuasa

